



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

IMPLEMENTASI ADMM PLUS EXPERT WORKING GROUP ON PEACEKEEPING OPERATIONS (EWG ON PKO) DAN HUMANITARIAN MINE ACTION FIELD TRAINING EXERCISE (EWG ON HMA FTX) SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI PERTAHANAN

PENERAPAN TEKNOLOGI SOUND SURVEILLANCE SYSTEM (SOSUS) UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KAPAL SELAM ASING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH



WAJAH BARU TAMPUK KEPEMIMPINAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PERIODE 2019-2024

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA NASIONAL GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



@kemhanri



@kemhan RI

ISSN 1693-0231



INDONESIA



Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi bulan September-Oktober 2019 Volume V Nomor 5.

Dalam edisi ini tim redaksi akan mengetengahkan beberapa artikel, diantaranya : Wajah Baru Tampuk Kepemimpinan Kementerian Pertahanan RI Periode 2019-2024; Implementasi ADMM Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operations (EWG on PKO) dan Humanitarian Mine Action Field Training Exercise (EWG on HMA FTX) sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan; Penerapan Teknologi Sound Surveillance System (Sosus) untuk Meningkatkan Pengawasan Terhadap Kapal Selam Asing dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh; Pengelolaan Sumber Daya Dan Sarana Prasarana Nasional Guna Mendukung Pertahanan Negara.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi



EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2019

Vol. V / No. 5

Diterbitkan oleh:
Biro Humas Setjen Kemhan
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasehat:

Menteri Pertahanan
Letjend TNI (Purn)
H. Prabowo Subianto

Sekjen Kemhan
Laksda TNI
Agus Setiadji, S.AP, M.A

Pemimpin Umum:

Karo Humas Setjen Kemhan
Brigjen TNI
Totok Sugiharto, S.Sos.

Pemimpin Redaksi:

Kabag Infopubliktaka Biro Humas
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Biro Humas

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, M.M.

Daftar Isi

ARTIKEL

5 /

WAJAH BARU TAMPUK KEPEMIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PERIODE 2019-2024

Saat upacara penyambutan jajar kehormatan berakhir, saat itu pun Menhan Prabowo Subianto yang diikuti beberapa pejabat Kemhan menuju Gedung AH. Nasution guna melangsungkan rangkaian Serah Terima Jabatan (Sertijab). Sertijab dilaksanakan secara resmi, khidmat dan hangat melalui penandatanganan dan penyerahan Memorandum Pelaksanaan Tugas Menteri Pertahanan yang dilakukan oleh Ryamizard Ryacudu selaku Menhan pada Periode Kabinet Kerja Masa Bakti 2014-2019 kepada Prabowo Subianto selaku Menhan pada Periode Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2024.



13 / IMPLEMENTASI ADMM PLUS EXPERT WORKING GROUP
ON PEACEKEEPING OPERATIONS (EWG ON PKO) DAN
HUMANITARIAN MINE ACTION FIELD TRAINING EXERCISE (EWG
ON HMA FTX) SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI PERTAHANAN

20 / PENERAPAN TEKNOLOGI SOUND SURVEILLANCE SYSTEM
(SOSUS) UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP
KAPAL SELAM ASING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH

26 / PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA
NASIONAL GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

BERITA PERTAHANAN

38 / KEMHAN WUJUDKAN STANDAR KUALITAS DAN
PROFESIONALITAS APN

39 / HUT KE -74 TNI, MENHAN BERHARAP TNI SEMAKIN MAJU
DAN KUAT SEBAGAI PENGAWAL NKRI

40 / KEMHAN MENGADAKAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

41 / SEKJEN KEMHAN MENERIMA PENYERAHAN 10 UNIT MOBIL
DARI ESEMKA

42 / PERTEMUAN SEKJEN KEMHAN RI-AS BAHAS KERJASAMA
INDUSTRI PERTAHANAN



WAJAH BARU TAMPUK KEPEMIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PERIODE 2019-2024

Oleh:

Muhammad. Adi. Wibowo, M.Si

Kasubbag Penerbitan dan Promosi Bagian Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Dinamika pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir Tahun 2019 telah masuki babak baru. Gambaran dinamika tersebut diawali proses upacara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilu Presiden untuk periode Tahun 2019-2024, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa selanjutnya ini seakan menjadi pusat perhatian dan sorotan banyak lapisan masyarakat nasional hingga internasional. Beberapa pemimpin negara serta para tamu penting dalam negeri turut menghadiri acara pelantikan yang bersejarah tersebut. Salah satu diantaranya Perdana Menteri Malaysia Y.M. Mahathir Mohamad, Sultan Brunei Darussalam Y.M. Sultan Hassanal Bolkiah, PM Singapura Y.M. Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Y.M. Scott Morrison, Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Y.M. Wang Qishan, Wapres Republik Uni Myanmar Y.M. Henry Van Thio, Wapres Republik Sosialis Viet Nam, 阮春福 Ngc Thnh, serta utusan khusus negara lainnya.

Selain dari beberapa negara sahabat, seremoni hajatan negara lima tahunan juga dihadiri oleh tamu undangan VVIP dan VIP dari dalam negeri, diantaranya Presiden kelima RI dan merupakan Presiden perempuan pertama di Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, eks Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh serta menteri-menteri

kabinet sebelumnya. Beberapa hari sebelum acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan, tepatnya tanggal 18 oktober 2019, Presiden Jokowi secara khusus menggelar acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan para menteri termasuk Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang sudah lima tahun bekerja bersama-sama. Dengan dibalut suasana santai dan hangat Wakil Presiden JK, seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara berkumpul pada akhir periode kepemimpinan Jokowi pada Jilid I ini.

Pada momen yang tak terlupakan tersebut Jokowi mengucapkan terimakasih kepada Wapres JK dan para menteri atas semua kerja keras selama lima tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Selain itu para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja juga mengisi acara tersebut dengan saling mengucapkan salam perpisahan. Bahkan beberapa diantaranya banyak meninggalkan pesan-pesan terutama bagi para pegawai yang mereka tinggalkan. Dengan adanya acara perpisahan tersebut maka menandakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi berakhir, begitu pula dengan Kabinet Kerja Jilid I.

Pemanggilan Nama-Nama Calon Menteri Hingga Pelantikan

Sehari setelah Joko Widodo Ma'ruf Amin secara resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode Tahun 2019-2024, maka, Presiden mulai memanggil nama-nama calon para menteri di Kabinet barunya. Rencananya Jokowi akan melantik para menteri pada Hari Rabu Tanggal

23 Oktober 2010. Beberapa daftar nama termasuk didalamnya Bapak H. Prabowo Subianto ikut dipanggil Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Istana Negara.

Dengan menggunakan kemeja panjang putih H. Prabowo Subianto mendatangi kompleks Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, H. Prabowo Subianto mengaku telah ditawarkan untuk menduduki salah satu jabatan menteri di Kabinet Jokowi Jilid 2, khususnya di bidang pertahanan. Bapak Prabowo juga menanggapi tawaran dari Presiden dengan positif. Selain itu beliau juga mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024 (www.kompas.com/2019/10/22).

Beberapa hari setelah pemanggilan nama-nama calon menteri didalam Kabinet Kerja, akhirnya tepat tanggal 23 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 di Istana Negara. Acara pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan-keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya acara di teruskan dengan pembacaan daftar nama-nama Menteri serta pejabat negara lain yang akan dilantik. Pelantikan 34 Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2019.

Setelah pembacaan daftar susunan kabinet, prosesi yang sangat resmi itupun dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan

yang dipandu langsung oleh Presiden Jokowi. H. Prabowo Subianto dengan mengenakan setelan Jas hitam berdasari merah dan memakai Peci hitam ikut berdiri diantara 33 Menteri lainnya mengucapkan sumpah jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada para menteri yang telah terpilih dengan diiringi lagu-lagu wajib nasional.

Pada sesi terakhir acara pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden tidak melupakan untuk melakukan foto bersama dengan para menterinya yang baru di Halaman Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya bersyukur acara pelantikan kali ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan. Jika lima tahun sebelumnya Jokowi berfokus pada kerja, kerja, kerja, maka kabinet kali ini arahnya untuk mengantarkan Indonesia maju.

Seperti dilansir dari portal resmi Setneg.go.id, Jokowi dengan lugas mengatakan akan mengejar yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, membuka lapangan pekerjaan, juga menarik investasi sebanyak-banyaknya. "Bawa reformasi demokrasi harus dilakukan secara konkret, hal-hal yang *ruwet*, yang ribet disederhanakan. Kemudian tentu saja prioritas utama lima tahun kedepan adalah pembangunan SDM sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai, dan memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah kompetitif, indeks yang meloncat lebih baik. Dan yang paling terakhir,

penggunaan APBN yang fokus, dan terarah" tegas Presiden Joko Widodo.(<https://setneg.go.id/>).

Moment Perpisahan Dengan Seluruh Pegawai Kemhan

Sementara itu ditempat terpisah, di Kantor Kementerian Pertahanan (23/10) mengakhiri jabatan sebagai Menteri Pertahanan untuk periode 2014-2019, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu berpamitan kepada segenap pegawai Kementerian Pertahanan. Moment kesempatan untuk berpamitan dilaksanakan melalui Apel Perpisahan di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dihadapan Pegawai Kemhan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang didampingi jajaran Pejabat Kemhan menyampaikan ucapan terimakasih



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Upacara Jajar Kehormatan, Menyambut Menhan Prabowo Subianto



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

atas dukungan yang tulus dari seluruh Pegawai Kemhan, sehingga selama lima tahun ini mampu menyelesaikan tugas dengan baik dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu berpesan kepada seluruh pejabat dan personel Kemhan untuk tetap melaksanakan tugas sebaik – baiknya sebagaimana kewajiban dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara yang telah diberikan kepercayaan dan digaji oleh negara. Selain itu beliau juga mengingatkan tetap loyal serta berani membela kejujuran dan kebenaran sampai mati, dan pesan ketiga untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila yang merupakan alat pemersatu bangsa. “Loyal, laksanakan tugas sebaik – baiknya dimanapun bertugas. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana kebersamaan, itu yang paling penting”, pesan Ryamizard Raycudu. Kemhan diharapkan akan semakin maju, sukses dan dapat menjalankan tugas pertahanan negara dengan baik. “Besok saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan baru, mudah – mudahan Kemhan bertambah jaya, bertambah mantap dan disegani orang”, imbuhnya. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/23>).

Sebagaimana diketahui, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu telah menjabat secara penuh selama lima tahun pada Kabinet Kerja 2014-2019, dan banyak kebijakan dan capaian – capaian program yang sudah dilakukan selama lima tahun memimpin Kemhan. Salah satu pencapaian program meliputi, terwujudnya Pertahanan Negara yang mampu menghadapi ancaman, terwujudnya Pertahanan Negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah yurisdiksi dirgantara, terwujudnya Pertahanan Negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia, terwujudnya industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing dan meningkatnya kesadaran bela negara Warga Negara Indonesia.

Setelah melaksanakan perpisahan dengan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, saat nya jajaran pimpinan serta seluruh pegawai Kemhan menantikan kedatangan sosok seorang Menteri Pertahanan yang baru. Sehari sesudah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju untuk masa bhakti 2019-2024, Menhan Prabowo Subianto menuju ke kantor Kementerian Pertahanan guna melaksanakan prosesi Upacara Serah Terima Jabatan dengan Ryamizard Ryacudu selaku pejabat Menhan pada Periode Kabinet Indonesia Maju masa bhakti 2014-2019.

Setibanya di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Kemhan, Kamis (24/10) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut melalui Upacara Jajar Kehormatan. Seluruh pejabat dari berbagai Satuan Kerja di Kementerian Pertahanan juga ikut hadir dalam proses jajar kehormatan tersebut. Usai melaksanakan jajar kehormatan, Sekjen Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji langsung mendampingi Menhan Prabowo Subianto, untuk memperkenalkan jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan. Saat upacara penyambutan jajar kehormatan berakhir, saat itupun Menhan Prabowo Subianto yang di ikuti beberapa pejabat Kemhan menuju Gedung AH. Nasution guna melangsungkan rangkaian Serah Terima Jabatan (Sertijab). Sertijab dilaksanakan secara resmi, khidmat dan hangat melalui penandatangan dan penyerahan Memorandum



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pelaksanaan Tugas Menteri Pertahanan yang dilakukan oleh Ryamizard Ryacudu selaku Menhan pada Periode Kabinet Kerja Masa Bakti 2014-2019 kepada Prabowo Subianto selaku Menhan pada Periode Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2024.

Ikut menyaksikan acara Sertijab Menhan pada momen itu, Wakil Presiden Indonesia ke-6 Try Sutrisno, mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Saat momen sertijab sekaligus juga pelaksanaan Kenal Pamit, Menhan Prabowo Subianto mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kemhan dan juga kepada

Ryamizard Ryacudu yang telah menyambut kedatangannya di kantor Kemhan dengan baik. Secara khusus Menhan Prabowo Subianto menyampaikan selamat jalan kepada Ryamizard Ryacudu, dan pastinya diharapkan akan terus bersama-sama akan terus berbakti kepada bangsa dan negara. Disamping itu diyakini juga oleh Menhan Prabowo, meskipun pengabdiannya sebagai Menhan telah selesai, Ryamizard Ryacudu akan terus mengabdi di bidangnya dan akan terus menyuarakan cintanya terhadap Tanah Air Indonesia dan kepada Merah Putih yang akan dijunjung dan dipertahankan sampai titik darah penghabisan. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/24>).

Sebaliknya juga, Ryamizard Ryacudu menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas pelantikannya sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju Masa Bhakti 2019-2024. Menurutnya tugas dan amanah dari seorang Menteri Pertahanan

sangat luar biasa, karena merupakan tugas yang sangat besar yakni tugas menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. Lebih lanjut Ryamizard Ryacudu menyempatkan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi kepada segenap pegawai Kemhan yang telah bekerja sama, bersinergi, dan bekerja sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku. Usai mengikuti rangkaian serah terima jabatan Menhan Prabowo Subianto mengutarakan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan periode Kabinet Indonesia Maju Masa Bakti 2019-2024 akan meneruskan langkah-langkah program Kementerian Pertahanan yang sudah dirintis sebelumnya oleh Ryamizard Ryacudu. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/24>).

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu juga mengakui bangga dapat melanjutkan tugas dan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

jejak Ryamizard Ryacudu dan akan berusaha sepenuhnya sekuat tenaga untuk melanjutkan apa yang telah dirintis selama lima tahun ini. Menhan yang pernah juga menjabat Danjen Kopasus itu juga mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisi terakhir dari Pertahanan

RI sebelum mulai bekerja. Dirinya pun akan mencari terobosan – terobosan baru untuk kemajuan pembangunan kekuatan pertahanan. Menhan Prabowo Subianto mengaku sudah diingatkan oleh pejabat Menhan pendahulunya Ryamizard Ryacudu bahwa tugas – tugas Menhan

sangat berat dalam membantu Presiden Republik Indonesia menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. Tugas yang dirinya terima dari Presiden RI adalah untuk ikut membantu memperkuat TNI dan supaya bisa menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Diungkapkannya, dalam waktu cepat akan segera mempelajari tugas – tugas yang perlu segera diselesaikan dengan bekerjasama Mabes TNI dan juga ketiga Angkatan serta kementerian terkait guna mencari solusi yang terbaik.

Kehadiran Seorang Wakil Menteri Pertahanan

Dinamika tampuk kepemimpinan di Kementerian Pertahanan saat ini tidak hanya sebatas pergantian Menteri, namun di era Pemerintahan

H. PRABOWO SUBIANTO
Menteri Pertahanan RI
Periode 2019-2024

Tempat/Tanggal Lahir
Jakarta, 17 Oktober 1951

Agama
Islam

Pendidikan

- Akademi Militer Nasional, Magelang (1970-1974)
- American School, London (1964-1967)
- International School, Zurich (1963-1964)
- Victoria Institution, Kuala Lumpur (1960-1963)

Kursus/Pelatihan

- German GSG-9 anti-terror (1981)
- Fort Benning (1985)

www.kemhan.go.id

Karir

- Komandan Jenderal Kopassus TNI (1996-1998)
- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI (1998-1998)
- Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI TNI (1998-1998)
- Presiden Direktur PT Nusantara Energy (2002)
- Presiden Direktur PT Kertas Nusantara (2001-2009)
- Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung (2002)
- Ketua Umum Koperasi Garuda Yaksia (2015)
- Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
- Ketua Umum dan Ketua Partai Gerindra (2008)
- Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (2004)
- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2004)
- Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan (2001)

Tanda Penghargaan

- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
- Satya Lencana Seroja Ulangan - III
- Satya Lencana Raksha Dharma
- Satya Lencana Dwija Sistha
- Satya Lencana Wira Karya
- The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja
- Bintang Yudha Dharma Nararya

Publikasi Buku

- Paradoks Indonesia (2015)
- Membangun Kembali Indonesia Raya (2014)
- Selamatkan Indonesia Raya (2009)

www.kemhan.go.id



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Presiden Joko Widodo di jilid 2 ini, Kementerian Pertahanan juga kedatangan seorang Wakil Menteri Pertahanan yang baru.

Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jumat 25 Oktober 2019, nama Sakti Wahyu Trenggono secara resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk mendampingi Menhan Probowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sakti Wahyu Trenggono merupakan salah satu dari 12 Wakil Menteri yang membantu Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan wakil menteri negara ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Seperti dilansir CNN Indonesia.com Sakti Wahyu Trenggono yang memiliki *background* sebagai pengusaha teknologi dilantik menjadi Wakil Menteri Pertahanan ditugaskan membantu Menhan

Prabowo Subianto mengawal isu pertahanan negara. Sakti Wahyu Trenggono mengaku bahwa Presiden Joko Widodo telah menitipkan kepada dirinya terkait tugasnya sebagai Wakil Menteri Pertahanan, khususnya bidang industrialisasi pertahanan di Indonesia agar dikembangkan lebih kuat dan lebih maju lagi (<https://cnnindonesia.com/20191025>).

Kedua pimpinan Menhan, Prabowo Subianto ataupun Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono memulai tugas pertamanya, Senin (28/10) dengan mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan) Kampus Bela Negara yang berada di Sentul, Bogor. Selain mengunjungi fasilitas yang ada di Kampus UNHAN, Menhan juga memberikan pengarahan kepada pejabat dan Staf di jajaran Universitas Pertahanan.

Dalam pengarahannya, Menhan mengatakan bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pertahanan yang handal dan unggul merupakan kunci utama dalam mewujudkan stabilitas keamanan. Unhan menjadi garda terdepan baik dalam memberikan masukan untuk pengkajian terhadap kebijakan pertahanan negara maupun dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian Unhan sangatlah strategis, tantangan dunia pendidikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini menjadi sangat kompleks. Unhan dituntut mampu mengikuti dan menyesuaikan dinamika tersebut, "Perlu inovasi dan strategi yang tepat untuk selalu eksis di tengah persaingan global", ungkap Menhan. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/28>).

Terlepas dari karakter berbeda yang dimiliki masing-masing dua sosok pemimpin di Kementerian Pertahanan, baik Menhan H. Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono akan menambah sejarah daftar pejabat selaku Menteri dan Wakil Menteri di Jajaran Kementerian Pertahanan. Sebagai warga negara Indonesia yang turut ikut membela negara sudah



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Wakil Menteri Pertahanan RI
Periode 2019-2024

• Tempat / Tanggal Lahir
Semarang, 3 November 1962 • Agama
Islam

Pendidikan

- 2006 : S-2 Magister Management ITB
- 1986 : S-1 Teknik Industri ITB

Karir

- 2018 - sekarang
Komisaris - PT. Merdeka Copper Gold Tbk
- 2018 - sekarang
Direktur Perencanaan dan Pengembangan - INKUD
- 2009 - sekarang
Komisaris- PT. Tower Bersama Tbk
- 2004 - sekarang
Management ITB - Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business
- 2010 - 2016
Komisaris Utama - PT. Teknologi Riset Global Investama
- 2005 - 2016
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi
- 2000 - 2009
Direktur Utama - PT. Solusindo Kreasi Pratama
- 1995 - 1997
Astra Group
 - Management Information System
 - Business Development
 - Supply Chain Management
- 1986 - 1992
Federal Motor
 - Programmer
 - System Analyst & Development

www.kemhan.go.id

pantasnya kita ikut mendukung dua pimpinan baru ini dalam mengelola penyelenggaraan bidang pertahanan negara. Selain itu doa akan selalu teriring untuk Bapak Menhan dan Wamenhan agar semoga kedepannya dapat memajukan kekuatan pertahanan lebih baik lagi dalam rangka menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa Indonesia***

Referensi Website :

- https://setneg.go.id/baca/index/jokowi_kabinet_kali_ini_arahnya_untuk_menghantarkan_indonesia_maju
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/114049465/prabowo-subianto-tiga-kali-bertarung-di-pilpres-kini-ditawari-jadi-menteri?page=all>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/23/akhiri-jabatan-sebagai-menhan-ryamizard-ryacudu-berpamitan-kepada-pegawai-kemhan.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/24/melalui-upacara-jajar-kehormatan-kemhan-sambut-kedatangan-menhan-prabowo-subianto.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/24/18312.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/25/menhan-prabowo-subianto-akan-lanjutkan-program-program-kemhan.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/28/menhan-kunjungan-ke-kampus-bela-negara-unhan.html>
- <https://cnnindonesia.com/nasion/91025201924-20-442980/guyon-prabowo-ke-wakil-menhan-kamu-yang-kerja-aku-tidur>

IMPLEMENTASI ADMM PLUS EXPERT WORKING GROUP ON PEACEKEEPING OPERATIONS (EWG ON PKO) DAN HUMANITARIAN MINE ACTION FIELD TRAINING EXERCISE (EWG ON HMA FTX) SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI PERTAHANAN

Oleh:
Marina Ika Sari
Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus) adalah bentuk perluasan kerjasama dari ADMM yang merupakan pertemuan antar Menteri Pertahanan ASEAN dalam bentuk dialog dan kerjasama praktis di bidang pertahanan. ADMM Plus bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building measures*) di antara negara-negara ASEAN dan menjaga perdamaian serta stabilitas keamanan di kawasan (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.). ADMM Plus dibentuk berdasarkan *Concept Note* yang diadopsi pada saat pertemuan ADMM kedua di Singapura tahun 2007 (ADMM, 2017). ADMM Plus terdiri dari sepuluh negara ASEAN dan delapan negara mitra wicara ASEAN yaitu Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Republik Korea (ROK), Selandia Baru, India, dan Rusia (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.).

ADMM Plus memiliki sejumlah *Experts Working Groups* (EWGs) dalam mengimplementasikan kerjasama antar negara-negara anggota. EWGs memiliki tujuh fokus bidang kerjasama yang telah disepakati antara lain: (1) *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR), (2) *Military Medicine* (MM), (3) *Counter Terrorism* (CT), (4) *Maritime Security* (MS), (5) *Peacekeeping Operations* (PKO), (6) *Humanitarian Mine Action* (HMA), dan (7) *Cyber Security* (CS) (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.).

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan ADMM Plus 2019 yang digelar pada 14-22 September 2019 di *International Peace and Security Center* (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam penyelenggaran tahun ini, kegiatan ADMM Plus berfokus pada kegiatan ADMM Plus Expert Working Group on

Peacekeeping Operations (EWG on PKO) dan ADMM Plus Expert Working Group on *Humanitarian Mine Action Field Training Exercise* (EWG on HMA FTX) (Gewati, 2019), dimana Indonesia bersama dengan Australia merupakan *Co-Chair ADMM Plus EWG on PKO* untuk periode 2017-2020 (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.). Dua fokus ADMM Plus tersebut diperlukan sebagai sebuah upaya untuk mendukung implementasi manajemen konflik dalam spektrum perdamaian dan keamanan (Poskota News, 2019).

Latihan militer bersama ini diikuti oleh lebih dari 500 orang meliputi personel militer yang terdiri dari diikuti oleh 52 orang *Subject Matter Expert* (SME), 14 instruktur, 67 orang observer, 227 orang peserta yaitu pasukan perdamaian dan pasukan penjinak ranjau, 80 orang *role player* serta 271 orang pendukung latihan dari 18 negara (Pusat Penerangan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

TNI, 2019). Secara umum, *ADMM Plus* 2019 yang berfokus kepada *EWG on PKO* dan *EWG HMA FTX* bertujuan sebagai upaya persiapan operasi pemeliharaan perdamaian dengan meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara peserta *ADMM Plus*. Selain itu, latihan ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perang dan mengatasi kemungkinan bencana akibat perang saat ini (Gewati, 2019). Latihan gabungan ini mempunyai nilai strategis untuk menyamakan pandangan dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan seperti ancaman nyata, ancaman tidak nyata, dan ancaman *mindset* (radikalisme) (Gewati, 2019).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan *EWG on PKO* dan *EWG HMA FTX* dimulai dengan acara pembukaan, latihan militer bersama, dan acara penutupan. Menteri Pertahanan

Indonesia, Ryamizard Ryacudu membuka secara resmi latihan militer *ADMM Plus EWG on PKO* dan *EWG HMA FTX* pada 16 September 2019. Acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh Sekjen Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A., Irjen Kemhan Laksda TNI Dr. Dudit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., dan Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.I.P., M.AP, serta para pejabat tinggi Mabes TNI, Duta Besar negara-negara ASEAN, pejabat *ADSOM plus*, serta para peserta pelatihan dari 18 negara-negara kawasan (Pusat Penerangan TNI, 2019).

Kemudian, para peserta melaksanakan pelatihan dengan skenario yang dilatihkan dalam latihan PKO antara lain *Sexual Exploitation Abuse* (SEA) yang terdiri dari *Mine Incident*, *Unexpected (Illegal) Checkpoint*, *Children affected in Arm Conflict* (CAAC),

Security/Screening, dan *Improvised Explosive Device* (IED). Sedangkan untuk skenario yang dilatihkan dalam latihan HMA FTX antara lain *Flatland Area*, *Mountain Area*, *Road Section*, *Forest Area*, dan *Detection and Neutralisation of IED*. Setelah kegiatan latihan selesai, para peserta latihan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk melihat gambaran dan mempelajari budaya Indonesia (Rakyat Merdeka, 2019). Penyelenggaraan latihan gabungan *ADMM Plus EWG on PKO* dan *EWG HMA* pun ditutup pada 20 September 2019 yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Novrizaldi & Hutami, 2019).

ADMM Plus sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan

Menurut Cottey dan Foster, diplomasi pertahanan adalah "the



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

peacetime use of armed forces and related infrastructure (primarily defense ministries) as a tool of foreign and security policy" and more specifically the use of military cooperation and assistance" (Cottee & Foster, 2004). Merujuk pada konsep diplomasi pertahanan tersebut, maka pada dasarnya kerjasama pertahanan yang dibentuk oleh negara-negara anggota ADMM Plus EWG on PKO dan HMA FTX merupakan dua bentuk implementasi dari diplomasi pertahanan yaitu berupa latihan militer multilateral untuk tujuan pelatihan dan pemberian keahlian dan saran pada kontrol angkatan bersenjata secara demokratis, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer. Selanjutnya, latihan gabungan ADMM Plus EWG on PKO dan HMA FTX juga sejalan dengan salah satu peran diplomasi pertahanan yakni mendukung negara-negara lainnya dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam misi perdamaian PBB serta menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia (Cottee & Foster, 2004).

Secara umum, diplomasi pertahanan juga memiliki tiga karakteristik antara lain diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk *confidence building measures* (CBM), kapabilitas pertahanan, dan industri pertahanan. Diplomasi pertahanan untuk CBM dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik antarnegara, menurunkan ketegangan dan mispersepsi, saling terbuka dan transparan dalam mengembangkan kapabilitas militernya, sehingga setiap negara tidak menganggap

negara lainnya sebagai ancaman dan dapat membangun *mutual trust* diantara mereka. Selain itu, diplomasi pertahanan untuk CBM juga dapat meningkatkan dan memperkuat persepsi terhadap kepentingan bersama, merubah pola pikir negara lain, dan membuka peluang kerjasama-kerjasama di bidang lainnya (Muthanna, 2011).

Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara dalam menghadapi potensi ancaman. Hal tersebut berhubungan dengan kerjasama keamanan seperti latihan bersama, eksport-impor alutsista, pertukaran personel militer untuk tujuan pendidikan dan pelatihan. Diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan bertujuan untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan sebuah negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama industri pertahanan, transfer teknologi, pemberian



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

lisensi, dan investasi dalam bidang industri pertahanan (Multazam, 2010).

Dari ketiga karakteristik tersebut, *ADMM Plus EWG on PKO* dan *HMA FTX* selaras dengan karakteristik diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk membangun CBM dan meningkatkan kapabilitas pertahanan. Pada dasarnya, *ADMM Plus* memang terlaksana dengan tujuan untuk menciptakan CBM karena dalam implementasi kerja sama, negara-negara peserta untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Selanjutnya, melalui latihan gabungan ini diharapkan dapat membangun rasa saling percaya dan menghormati antar pasukan dari berbagai negara yang terlibat. Melalui *ADMM Plus EWG on PKO*

dan *HMA FTX* ini, dapat dilihat bahwa negara-negara di kawasan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam rangka mencapai tujuan bersama, membangun CBM dan tercapainya kesetaraan, sehingga dapat mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas (Poskota, 2019).

Dengan adanya *sharing knowledge* dan pelatihan keterampilan teknis bagi para peserta dalam kegiatan *ADMM Plus*, hal ini dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh personel militer termasuk soal keterampilan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan dalam bidang pertahanan (Danu, 2019). Sehingga diharapkan pengetahuan yang telah diperoleh dapat disebarluaskan kepada

personel militer lainnya di negara masing-masing. Sejalan dengan inisiatif *Action For Peace Keeping* (A4P), latihan gabungan ini merupakan aplikasi dari upaya untuk peningkatan kemampuan (*capacity building and performance*) serta kerjasama (*partnership*) yang harus terus dibangun secara komprehensif untuk meningkatkan profesionalisme para pasukan perdamaian di daerah penugasan maupun di forum internasional (TNI, 2019).

Selanjutnya, latihan gabungan *ADMM Plus EWG on PKO* juga membantu untuk meningkatkan kapabilitas militer negara anggota dalam menjalankan misi perdamaian PBB. Berbicara mengenai pasukan perdamaian PBB, tidak hanya pasukan perdamaian laki-laki yang memiliki peran dalam melaksanakan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

tugas misi perdamaian. Pada kerjasama *ADMM Plus* ini, juga ditekankan mengenai peningkatan partisipasi personel militer wanita dengan harapan adanya peningkatan pengiriman pasukan perdamaian wanita ke wilayah misi (Giwati, 2019). Para pasukan perdamaian wanita memiliki peran yang cukup signifikan dalam keberhasilan dan kelangsungan misi perdamaian.

Kehadiran mereka di negara misi sangat diperlukan khususnya untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada berbagai pihak, khususnya korban konflik, yang mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, para pasukan perdamaian wanita juga dapat membantu mengurangi konflik dan konfrontasi, memberikan dukungan, *role model* bagi komunitas perempuan di daerah konflik, dan kehadiran mereka juga dapat menciptakan rasa aman bagi populasi lokal khususnya perempuan dan anak-anak korban konflik (Gewati, 2019). Ke depan, diharapkan pasukan militer wanita lebih banyak terlibat dan berpartisipasi dalam latihan-latihan gabungan seperti *ADMM Plus EWG on PKO* dan *HMA FTX* ini.***

Referensi

- ADMM. (2017, 02 06). *About the ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)* . Retrieved 10 01, 2019, from ADMM: <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html>
- Cottney, A., & Foster, A. (2004). *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- Danu. (2019, September 20). *ADMM Plus 2019 Resmi Ditutup, Panglima Minta Peserta Komit Jaga Perdamaian*. Retrieved Oktober 3, 2019, from Rakyat Merdeka News: <https://rmco.id/baca-berita/government-action/18494/admm-plus-2019-resmi-ditutup-panglima-minta-peserta-komit-jaga-perdamaian>
- Gewati, M. (2019, 09 17). Menhan Membuka Asean Defense Ministers Meeting di Sentul. Retrieved 10 02, 2019, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/>

[read/2019/09/17/15512911/menhan-membuka-asean-defense-ministers-meeting-di-sentul?page=all](https://read.ebscohost.com/10.1007/s11596-019-0951-1)

- Multazam, A. (2010). Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muthanna, K. (2011). *Military Diplomacy. Journal of Defense Studies*, 5, 1-15.
- Novrizaldi & Hutami, A. S. (2019, 09 20). LatGab Terbesar, TNI Harap Perkuat Kerja Sama Militer. Retrieved 10 02, 2019, from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/445988/politik/latgab-terbesar-tni-harap-perkuat-kerja-sama-militer>
- Poskota News. (2019, 09 21). Panglima TNI: ADMM Plus Refleksikan Upaya Bangun Rasa Saling Percaya Negara ASEAN. Retrieved 10 02, 2019, from Poskota News: <https://poskotanews.com/2019/09/21/panglima-tni-admm-plus-refleksikan-upaya-bangun-rasa-saling-percaya-negara-asean/>
- Pusat Penerangan TNI. (2019, 09 16). Kasum TNI Hadiri ADMM Plus EWG on PKO and HMA FTXs Tahun 2019. Retrieved 10 02, 2019, from TNI: <https://tni.mil.id/view-159773-kasum-tni-hadiri-admm-plus-ewg-on-pko-and-hma-ftxs-tahun-2019.html>



Sumber foto: Biro Humas Setjen Kemhan

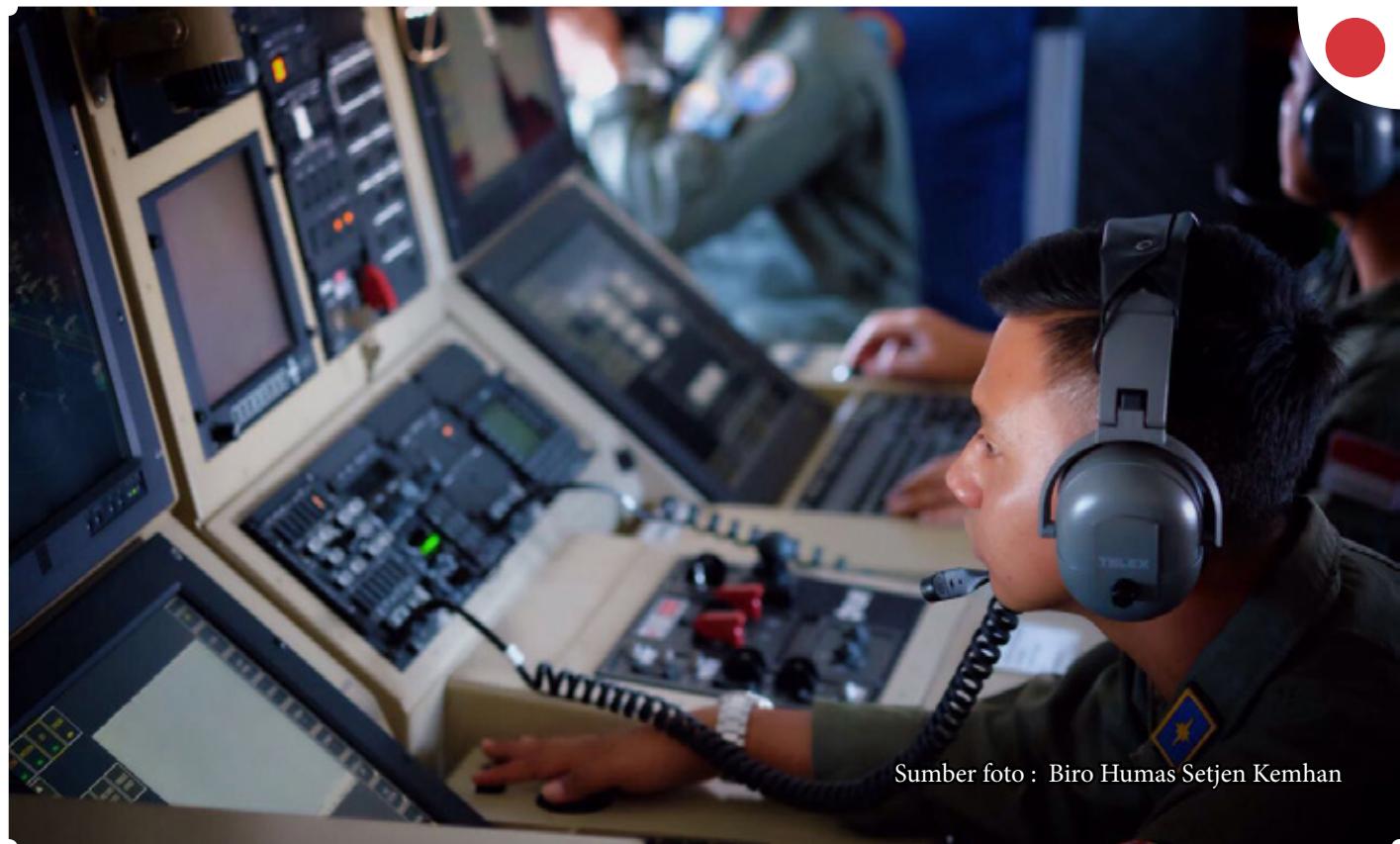
PENERAPAN TEKNOLOGI SOUND SURVEILLANCE SYSTEM (SOSUS) UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KAPAL SELAM ASING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH

Oleh:

Kolonel Tek Nanang Hery S., S.T.

Kasubdit Tata Kelola Direktorat Materiil

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Umum

Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah laut, maka secara logis sebagian besar potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di dan atau dari laut. Potensi ancaman menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada dalam lalu lintas perdagangan dunia. Sehubungan dengan potensi ancaman dimaksud, maka konsekuensi logis lainnya atas pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah adanya kewajiban untuk menetapkan alur lalu lintas bagi pelayaran internasional yang diaplikasikan dengan penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keberadaan ALKI dapat dimanfaatkan oleh

beberapa negara untuk melaksanakan berbagai aksi dan tindakan yang berhubungan dengan kepentingannya, dengan berbagai dalih dan alasan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi armada kapal niaga maupun kapal perangnya. Kondisi demikian mengakibatkan Indonesia dikelilingi oleh ruang terbuka (laut) yang berbatasan dengan negara lain.

Dalam perspektif pertahanan, kondisi ini membuka peluang datangnya ancaman dari berbagai arah, khususnya dari daerah corong-corong strategis (*choke points control*). Salah satu contohnya kapal selam asing yang masuk ke wilayah teritorial laut Indonesia lewat ALKI kebanyakan tidak terpantau dengan optimal, mengingat jumlah armada kapal patroli yang dilengkapi

Sonar relatif masih terbatas. Selain itu sampai saat ini TNI AL belum memiliki sistem pertahanan bawah air yang optimal. Sehubungan dengan hal itu, tantangan terbesar adalah bagaimana cara memantau pergerakan kapal selam asing dengan teritorial laut yang sedemikian luas. Oleh karena itu, media laut merupakan *center of gravity* dari pertahanan negara yang intinya mewujudkan pengendalian laut (*sea control*) secara utuh. Sistem pertahanan bawah air hendaknya mendapat prioritas utama, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rapuh terhadap ancaman tersebut.

Disisi lain konsep pertahanan yang ideal bagi suatu negara, harus dapat mengeksplorasi keadaan-keadaan fisik dan non-fisik negara tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu keunggulan yang mampu dimanfaatkan untuk melemahkan dan mengalahkan musuh. Berdasarkan kondisi geografi Indonesia, utamanya aspek *hidro-oseanografi*, maka konsep pertahanan laut Indonesia sangat relevan bila mengarah pada konsep peperangan bawah air, baik peperangan kapal selam dan anti kapal selam maupun peperangan ranjau dan anti ranjau. Saat ini negara-negara di kawasan telah membangun kekuatan armada tempurnya dengan membeli beberapa kapal selam lengkap dengan sistem senjata utamanya yaitu torpedo, demikian pula dengan kapal penyebar dan buru ranjau yang cukup handal didukung peralatan dengan teknologi mutakhir.

Sehubungan dengan hal itu, penguasaan teknologi *Sound Surveillance System (SOSUS)* dirasakan bersifat strategis, baik yang sederhana maupun yang kompleks seperti Sonar dan torpedo maupun kapal selam. Karakteristik media air laut cukup kompleks untuk dimodelkan secara matematis sehingga tingkat kesulitan dalam aplikasi teknologi *SOSUS* juga tinggi. Hanya negara-negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi *Underwater Acoustic* akan memiliki keunggulan. Konsep penerapan teknologi ini diimplementasikan dengan pemasangan peralatan sensor bawah air seperti *Fixed Hydrophone* atau *Sonar Station* yang digunakan sebagai sistem deteksi bawah air yang dihubungkan dengan stasiun penerima/pemantau di darat. *SOSUS* merupakan teknologi pemanfaatan gelombang suara yang merambat melalui laut menuju target dan dikembalikan sebagai *echo* menuju ke *hydrophone* untuk pendekripsi, pencarian dan pengklasifikasian kapal selam asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia khususnya di ALKI.

Sementara itu upaya pengamanan ALKI yang dilaksanakan selama ini dirasakan belum optimal, khususnya untuk mendeteksi ancaman yang datang dari

bawah permukaan air, seperti kehadiran kapal selam asing melalui jalur-jalur pendekat seperti selat-selat yang memiliki nilai strategis. Sebagai bentuk langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan tersebut, maka perlu penerapan teknologi *SOSUS* untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal selam asing.

Keterbatasan anggaran pertahanan saat ini akan berimplikasi pada keterbatasan untuk memiliki kemampuan sistem deteksi dan keterbatasan untuk dapat menghadirkan unsur-unsur permukaan maupun bawah air. Dihadapkan pada kondisi tersebut, maka diperlukan upaya kreatif, aplikatif dan solutif untuk tetap memiliki kemampuan pengawasan bawah air guna memonitor keberadaan kapal selam asing yang melintas di perairan Indonesia. Metode pengamanan yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan teknologi akustik, menggunakan Sonar Aktif maupun Pasif dengan cara memasang Sonar Station di pintu gerbang ALKI seperti Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar yang dapat memancarkan dan menerima gelombang suara terhadap pantulan objek bawah permukaan air yang dicurigai sebagai kapal selam. Pemilihan pintu gerbang ALKI didasarkan pada faktor strategis, yang terkait adanya dugaan digunakannya perairan tersebut sebagai salah satu pintu utama masuknya kapal selam asing ke perairan Indonesia. Dengan memperhatikan kondisi *Hidro-Oseanografi* perairan yang berhubungan dengan salinitas, temperatur, kecepatan perambatan suara dan lain sebagainya, maka akan didapat posisi penempatan Sonar Station yang diharapkan mampu mendeteksi seluruh area perairan pintu masuknya kapal selam asing, sehingga dapat menghasilkan pengamanan optimal sepanjang waktu, tanpa memerlukan kehadiran unsur-unsur KRI yang membutuhkan dana operasional besar.

Kemajuan Teknologi

Era global menuntut suatu bangsa memiliki penguasaan ilmu dan teknologi untuk dapat bertahan dan meraih keunggulan di abad 21. Pada lingkup global juga masih diwarnai oleh pesatnya perkembangan teknologi kemiliteran sebagai dampak dari *Revolution in Military Affairs (RMA)*. RMA membawa dampak terhadap kemajuan teknologi militer, konsep operasi, pengorganisasian, doktrin dan strategi militer, bahkan secara luas telah berpengaruh terhadap aspek politik, sosial dan ekonomi. Secara langsung maupun tidak langsung, RMA telah memicu perluasan perlombaan senjata yang menimbulkan potensi konflik, ancaman bagi negara lain dan mempengaruhi stabilitas keamanan regional maupun global.

Meningkatnya kesadaran akan lingkungan maritim (*Maritime Domain Awareness/MDA*) secara global juga akan mempengaruhi perubahan kebijakan strategis di kawasan. Teknologi Sonar sampai saat ini masih yang paling diandalkan dalam misi peperangan bawah air, khususnya dalam mendeteksi keberadaan dan posisi kapal selam. Dengan berada di *Shadow Zone*, kapal selam dapat terbebas dari deteksi Sonar yang dipacarkan kapal permukaan, atau aktivitasnya tersamarkan atas bantuan alam. Kapal-kapal selam asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia kebanyakan tidak terpantau dengan optimal, mengingat jumlah armada kapal patroli yang dilengkapi Sonar relatif masih terbatas. Selain mengandalkan teknologi propulsi yang kian senyap, Jamming Sonar, material pemantul gelombang suara, dan kemampuan bertahan menyelam lebih lama, pada dasarnya Sonar pada kapal pemburu dapat

dikecoh oleh kapal selam asing dengan memanfaatkan *Shadow Zone*.

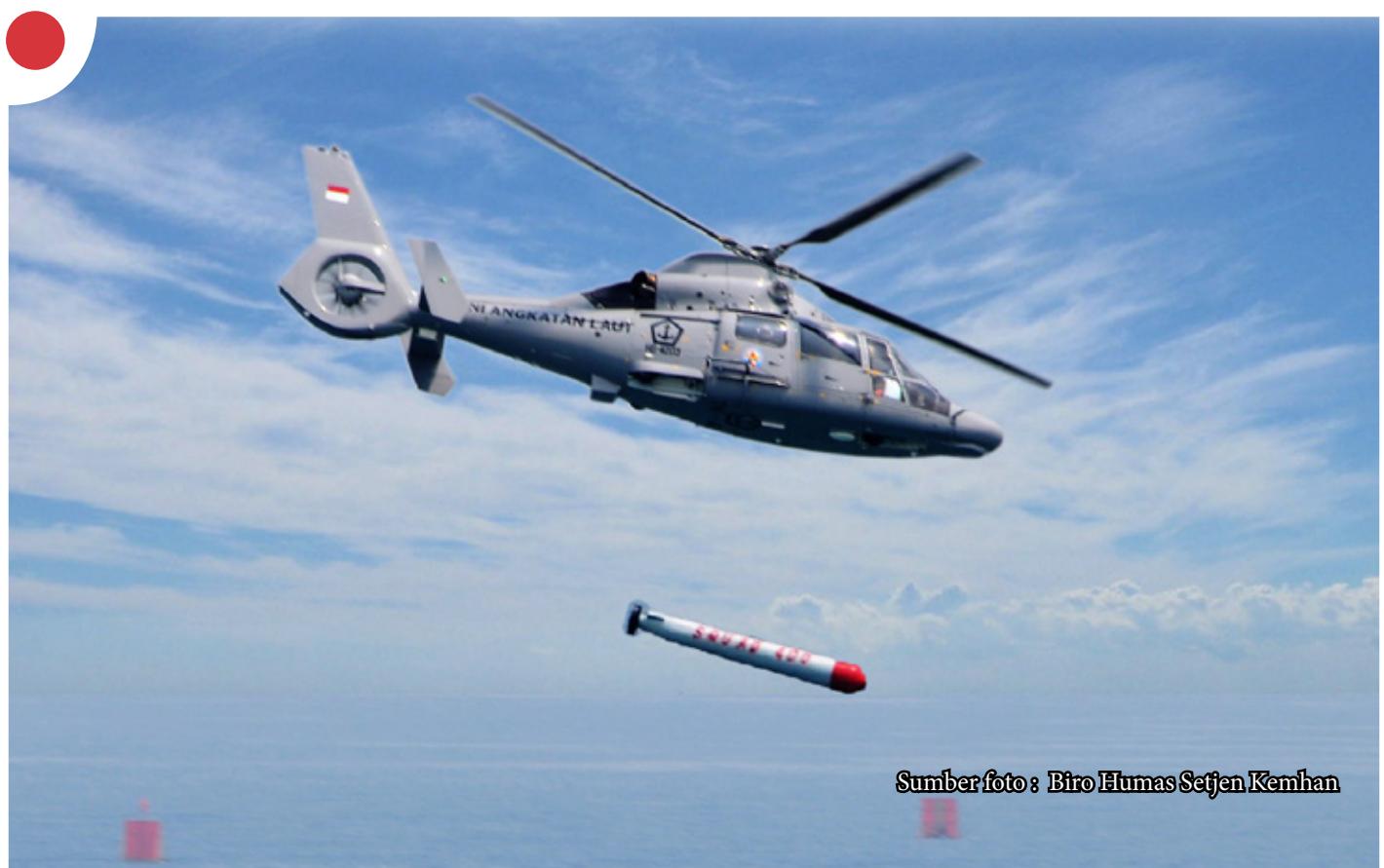
Shadow Zone merupakan daerah dimana temperatur dan salinitas pada lapisan kolom air tersebut dapat memantulkan ataupun membelokkan transmisi gelombang suara. Mencermati kondisi tersebut, perlunya penerapan teknologi *SOSUS* untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal selam asing sehingga dapat meningkatkan kemampuan TNI AL dalam peperangan kapal selam dan anti kapal selam. Dengan demikian, pertahanan negara yang tangguh dan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud.

Kemampuan Anggaran

Pembangunan kemampuan peperangan kapal selam dan anti kapal selam (AKS) selama ini masih terjebak pada modernisasi kapal selam itu sendiri. Sementara

terdapat aspek lain dalam peperangan AKS yang belum dieksplorasi dengan sungguh-sungguh, terencana, terprogram dan berkelanjutan. Dalam kemampuan peperangan AKS, upaya mendeteksi kapal selam lawan tak bisa hanya mengandalkan pada kapal selam, kapal permukaan berkemampuan AKS dan heli AKS. Ketiganya harus didukung juga oleh peralatan *SOSUS* yang dipasang pada sejumlah perairan Indonesia yang selama ini menjadi jalur lalu lintas kapal selam asing.

Sebagai contoh Selat Sunda, Selat Makassar dan Selat Lombok yang menjadi jalur masuknya kapal selam Australia menuju Indonesia, Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Isu pembangunan *SOSUS* memang tidak segencar sebagaimana pengadaan kapal selam. Harga satu unit *SOSUS* jauh lebih murah daripada satu unit kapal selam. Karena tak segencar



Sumber foto: Biro Humas Setjen Kemhan

akuisisi kapal selam, nyaris tak ada pihak yang memperhatikan pentingnya membangun kemampuan deteksi bawah air. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki *SOSUS* sebagai deteksi bawah permukaan air yang merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Data dan Fakta

Dinamika pembangunan kekuatan Angkatan Laut di kawasan Asia Pasifik terus berlangsung. Meskipun kawasan ini secara umum keamanannya stabil, akan tetapi potensi konflik masih ada. Konflik tersebut sebagian terkait dengan domain maritim, khususnya menyangkut sengketa batas maritim dan mempunyai keterkaitan pula dengan kandungan sumber daya laut di dalamnya.

Dalam konteks tersebut, salah satu fokus pembangunan kekuatan yang nampaknya menjadi agenda "bersama" di kawasan Asia Pasifik adalah pembangunan kemampuan peperangan AKS. Pembangunan kemampuan peperangan AKS merupakan respon terhadap pembangunan beberapa negara di kawasan yang mengakuisisi kapal selam baru dalam susunan tempur armadanya.

Secara garis besar, pembangunan kemampuan peperangan AKS di kawasan dilakukan dengan membeli kapal selam, kapal kombatan permukaan dan heli AKS. Di luar ketiga hal tersebut, sebenarnya masih ada unsur lainnya yaitu pembangunan sistem deteksi bawah air. Namun hal yang terakhir ini publikasinya tidak segencar pengadaan sistem senjata karena faktor kerahasiaan. Pemikiran *Balance of Power* menjadi

paradigma dominan di kawasan Asia Pasifik dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Terkait hal tersebut, TNI AL perlu mencermati dinamika pembangunan kekuatan di sekitarnya, khususnya kemampuan peperangan AKS dengan mengadopsi teknologi *SOSUS* sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Sebab dalam Rencana Strategis TNI AL, pembangunan kemampuan peperangan AKS merupakan salah satu program prioritas, namun belum ada pembangunan sistem deteksi bawah air atau *SOSUS*.

Perkembangan Lingkungan Strategis

- a. Australia. *Royal Australian Navy* (RAN) melalui program '*Plan Blue 2006*' merencanakan *upgrade* dan penggantian armada kapal-kapal permukaannya dalam waktu 10 tahun kedepan. Pada bulan Mei 2009, Pemerintah Australia telah menerbitkan dokumen buku putih pertahanan yang berjudul '*Defending Australia in the Asia-Pacific Century: Force 2030*'. Menurut Menhan Australia, RAN akan tumbuh menjadi kekuatan maritim yang jauh lebih besar dan lebih kuat didukung oleh kemampuannya yang meningkat. Selain pengadaan beberapa kapal selam dan delapan *Frigate* yang memiliki kemampuan peperangan AKS untuk menggantikan kapal perang kelas ANZAC, Australia juga merencanakan pengadaan sebuah kapal angkut baru, 20 *Offshore Combatant Vessels*, 6 *Heavy Landing Craft*, dan 1 kapal bantu.
- b. Cina. Pada tanggal 16 April 2009 dalam peringatan ke-60 Angkatan Laut Cina, Laksamana Wu Shengli, Panglima AL Cina mengemukakan bahwa prioritas pembangunan PLAN kedepan meliputi pengembangan persenjataan kapal perang ukuran besar, peningkatan kemampuan siluman dan daya jelajah kapal selam, pesawat supersonik, peluru kendali yang lebih akurat dengan jarak yang semakin jauh, torpedo laut dalam serta *upgrade* teknologi informasi.

Pemerintah Cina saat ini sedang melakukan fokus terhadap pengadaan perangkat keras Angkatan Laut, pelatihan, logistik, kemampuan produksi modern dan profesionalisme personel yang handal. Kedepan, Kapal Induk dan Armada Kapal Amfibi Cina diprediksi mampu melakukan operasi laut dan proyeksi kekuatan yang lebih jauh guna melindungi garis perhubungan laut yang membentang melalui Asia Tenggara hingga Samudera Hindia dengan didukung oleh kemampuan peperangan AKS serta kapal selam nuklir yang lebih handal.

- c. India. Pada bulan Maret 2010, Laksamana Nirmal Kumar Verma, Kasal India, mengatakan tentang ambisi Angkatan Laut India yang sedang mengadakan Kapal Permukaan, Pesawat dan Kapal Selam sesuai perencanaan pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Melalui perencanaan tersebut, pada tahun 2025 Angkatan Laut India akan mengoperasikan 162 buah Kapal Perang, termasuk 2 Kapal Induk dan Kapal Selam Diesel maupun Nuklir. India akan melengkapi *Network Centric Warfare* pada sebagian besar sistem kendali senjata dan menambah peralatan sensor deteksi canggih yang mampu mendukung kemampuan Angkatan Lautnya dapat beroperasi menjadi *Blue Water Navy*.

d. Malaysia. Angkatan Laut Malaysia sangat serius memperhatikan sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan, keamanan di Selat Malaka, dan kejahatan lintas negara. Kompleksitas penanganan hal tersebut dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya menjadikan tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Pemerintah Malaysia memberikan solusi dengan melengkapi Armada Kapal Selam yang beroperasi penuh pada akhir dekade ini, modernisasi Armada Kapal Permukaan dan pengadaan Kapal Patroli Pantai.

e. Singapura. Angkatan Laut Singapura atau *Republic of Singapore Navy* (RSN) meskipun dalam jumlah relatif kecil, namun dilengkapi dengan Alutsista modern. Kemampuan RSN telah meningkat pesat setelah datangnya 2 Kapal Selam terakhir dari 4 Kapal Selam Kelas *Challenger* (ex-*Sjoormen*) yang dibeli dari Swedia pada bulan Februari 2004. Pada bulan Desember 2011, kekuatan Armada kapal selam RSN kembali menguat seiring dengan selesainya satu dari dua kapal selam modernisasi eks AL Swedia kelas *Archer* (A-17). Kapal selam RSN terbaru tersebut dilengkapi dengan sistem Air *Independent Propulsion* (AIP) yang diintegrasikan dengan helikopter AKS dan 6 Frigate Kelas *Formidable*. RSS *Formidable* mulai operasional pada Mei 2007 dan kapal-kapal berikutnya mulai beroperasi dua tahun kemudian. Frigate RSN terbaru tersebut telah diperkuat dengan kemampuan peperangan anti udara, anti kapal permukaan dan anti kapal selam.

Pendekatan Keterpaduan

Memperhatikan dengan seksama

kecenderungan di kawasan terkait dengan kemampuan peperangan AKS, terdapat beberapa hal yang patut untuk dicermati:

- a. **Makin Pentingnya Peperangan AKS.** Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya kini semakin menyadari arti penting peperangan AKS, seiring bertambahnya populasi kapal selam di kawasan ini. Untuk menghadapi ancaman kapal selam, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang harus melibatkan unsur Kapal Kombatan Permukaan, Helikopter AKS, Kapal Selam dan sistem deteksi bawah air. Pola pikir seperti itulah yang melatarbelakangi semakin besarnya perhatian Angkatan Laut negara-negara kawasan terhadap penguasaan teknologi *SOSUS*.
- b. **Perencanaan Komprehensif.** Pembangunan kekuatan Angkatan Laut di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya dilaksanakan melalui perencanaan yang komprehensif. Hal ini tercermin dari kemampuan *interoperability* antara kapal selam, kapal kombatan permukaan dan helikopter AKS yang didukung dengan *SOSUS* sebagai satu kesatuan pembangunan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi peperangan AKS.
- c. **Keterpaduan Tiga Subsistem Senjata Dengan Sistem Deteksi.** Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya kini telah banyak yang mengoperasikan kapal selam dibandingkan 10 tahun silam. Pengoperasian kapal selam oleh suatu

negara secara umum kecenderungannya diikuti dengan akuisisi Kapal Kombatan Permukaan berkemampuan AKS, helikopter AKS dan penerapan *SOSUS* oleh negara itu. Perkembangan itu menunjukkan bahwa kini negara-negara di kawasan makin menggunakan pendekatan komprehensif dalam membangun kemampuan peperangan AKS, bukan sekedar memperkuat Armada Kapal Selam dan Kapal Kombatan Permukaan, tetapi juga melengkapi Helikopter AKS dan penguasaan teknologi *SOSUS*.

Analisa

Akuisisi Kapal Selam oleh beberapa negara di kawasan diikuti pula dengan pengadaan Kapal Kombatan Permukaan dan Heli AKS. Kecenderungan yang terjadi adalah paket pembelian Kapal Kombatan Permukaan, Heli AKS dan Kapal Selam sekaligus oleh suatu negara, selalu diikuti pula dengan penguasaan serta penerapan teknologi *SOSUS*. Kecenderungan seperti itu terjadi *by design* dan bukan kebetulan semata, karena perencanaan pembangunan kekuatan telah dirumuskan dengan jelas. Meningkatnya kemampuan peperangan kapal selam dan peperangan AKS beberapa negara di kawasan secara pesat, sementara kemampuan TNI AL, khususnya dalam peperangan kapal selam dan peperangan AKS dan akuisisi kapal selam belum mengalami kemajuan pesat.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pada kekuatan tempur (*Imbalance of Power*) TNI AL dihadapkan Angkatan Laut di kawasan yang dapat mengarah pada tindakan arogansi

negara lain di kawasan terhadap Indonesia. Untuk dapat memenuhi kemampuan pertahanan bawah air yang memadai, TNI AL harus memiliki Kapal Selam sejumlah 15 unit (Metode Posisi Duduk Dasar) dengan tingkat probabilitas pendekripsi mencapai 90% (Seskoal, 2006). Dengan jumlah Kapal Selam TNI AL yang hanya 4 unit dihadapkan dengan luas wilayah perairan yang ada serta kemampuan tempur yang dimiliki, maka probabilitas pendekripsi kapal selam menjadi tidak optimal (< 90%).

Maka tulisan ini menyarankan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi sistem deteksi terhadap kapal selam asing, sehingga di mulut-mulut corong pendekat strategis ditempatkan stasiun Sonar yang disebut dengan *SOSUS* yang fungsinya setara dengan Satuan Radar TNI AU. Konsepsi penerapan teknologi *SOSUS* untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal selam asing dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu :

- a. Terpenuhinya *SOSUS* dengan kemampuan melakukan pendekripsi kapal selam dari jarak jauh secara terus menerus, mengklasifikasi dan menentukan posisi kapal selam, serta memiliki efektivitas untuk pencarian area dengan tujuan sebagai deteksi dini (*early warning*).
- b. Memberikan efek *deterrence* kuat dan perlindungan terhadap keutuhan dan kedaulatan di seluruh wilayah NKRI serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kesimpulan

SOSUS merupakan teknologi pemanfaatan gelombang suara yang merambat melalui laut menuju target dan dikembalikan sebagai *echo* menuju ke *hydrophone* untuk pendekripsi, pencarian dan pengklasifikasian kapal selam asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia khususnya di ALKI.

Kapal selam asing yang masuk ke wilayah teritorial laut Indonesia lewat ALKI kebanyakan tidak terpantau dengan optimal. Tantangan terbesar adalah bagaimana cara memantau pergerakan kapal selam asing dengan teritorial laut yang sedemikian luas. Sistem pertahanan bawah air hendaknya mendapat prioritas utama, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rapuh terhadap ancaman dari kapal selam asing.

Pembangunan kemampuan peperangan AKS dilakukan tidak hanya dengan pembelian Kapal Selam, Kapal Kombatan Permukaan dan Heli AKS, tetapi harus diikuti dengan pembangunan sistem deteksi bawah air.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki *SOSUS* sebagai

deteksi bawah permukaan air, sehingga perlunya *SOSUS* untuk mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi sistem deteksi terhadap kapal selam asing dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dan Indonesia sebagai poros martim dunia.

Saran

Perlunya memasukkan kemampuan deteksi bawah air atau *SOSUS* pada Rencana Strategis TNI AL pada Tahap III (2020-2024) dan/atau tahap selanjutnya sebagai implementasi mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dan Indonesia sebagai poros martim dunia.

Perlunya mendorong Industri Pertahanan untuk melaksanakan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) dalam bidang teknologi *SOSUS* dan instrumen akustiknya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Perlunya kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang *SOSUS* dan penempatannya sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan pertahanan negara.***



Sumber foto : Kemhan

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA NASIONAL GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Oleh:

Jusuf Sarante, ST, MS.i

Analis Pertahanan Negara Madya Dit Tek Ind Pothan-Kementerian Pertahanan RI

Pendahuluan

DUntuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Indonesia dengan wilayah yang begitu luas (tambahan) memiliki sumber daya yang besar. Mulai dari jumlah penduduk yang banyak hingga sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi : sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana prasarana.

Dilihat dari sisi geografis, Indonesia juga merupakan pintu gerbang bagi kawasan Asia Pasifik. Hal ini akan menimbulkan tingkat kerawanan keamanan dan beberapa permasalahan regional lain seperti masalah perbatasan yang juga patut dicermati oleh Pemerintah Indonesia secara serius. Mengapa demikian ?, karena segala permasalahan tersebut merupakan perubahan fokus isu yang secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah

pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya (Christopher Rudolph, 2002).

Untuk menghadapi permasalahan ancaman yang semakin lama semakin meningkat dan beragam tersebut, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Permasalahan ancaman ini tentunya tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja akan tetapi untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer/TNI, ketiganya dijalin dalam satu kesatuan secara utuh didalam memperkuat sebuah negara.

Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi. Ideologi adalah sebuah harapan yang dibangun bersama secara sadar, karena ideologilah negara bisa tetap berdiri. TNI dengan rakyat diikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan atau *center of gravity* (CoG) bagi TNI. Tidak ada TNI kalau tidak ada rakyat karena TNI lahir dari rakyat. Konsep TNI adalah rakyat dan rakyat adalah tentara, merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal

formal yang mengatur tugas dan fungsi TNI dalam sistem bernegara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang menangani bidang pertahanan dan dalam pelaksanaannya dibantu komponen lain yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan yang berasal dari rakyat.

Dengan melihat latar belakang diatas, perlu suatu langkah strategis agar sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan dan terbangun daya saing bangsa (*nations competitiveness*). Salah satunya adalah dengan menciptakan sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara kedepannya. Pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat penting dan strategis dengan tujuan apabila negara membutuhkan sumber daya nasional untuk menunjang kepentingan pertahanan negara maka telah tersedia koridor hukum untuk penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil.

Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, yang

telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus 2015. Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden, dan ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan.

Dalam lampiran Perpres itu disebutkan, pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total,

terpadu, terarah, dan berlanjut.

Sementara itu terkait dengan peraturan tentang pengelolaan Sumber daya nasional serta prasarana nasional pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan bersama DPR pada tanggal 26 September 2019 lalu telah mensyahkan, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN). Didalam UU PSDN, pada Bab 1 di ketentuan umum pasal 1, dijabarkan beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut : kesatu, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; kedua, Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan; ketiga, Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk

kepentingan Pertahanan Negara; keempat, Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan Pertahanan Negara; kelima, Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional; keenam, Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan; ketujuh, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama; kedelapan, Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan; kesembilan, Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara; kesepuluh, Mobilisasi adalah tindakan penggerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; kesebelas, Demobilisasi adalah tindakan penghentian, penggerahan, dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi; keduabelas, Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia; ketigabelas, Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia; keempatbelas, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; kelimabelas, Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian diatas tersebut, pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Selain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga berlaku bagi Sarana dan Prasarana Nasional (UU PSDN, 2019).

Disamping itu pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga disebutkan dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui upaya: a. Bela Negara; b. membangun Komponen Utama; c. penataan Komponen Pendukung; d. pembentukan Komponen Cadangan; dan e. Mobilisasi dan Demobilisasi. Ketentuan mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam upaya membangun Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

a. Pengertian/Arti Bela Negara

Bela Negara diartikan sebagai tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

(Winarno, 2013: 228). Dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 disebutkan bahwa; "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara". Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa; "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Sedangkan Penjelasan UU No. 3 Tahun 2002 tentang pembelaan negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam

pengabdian kepada negara dan bangsa.

b. Pembangunan Komponen Utama Pertahanan

Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, Pasal 30 UUD 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan

nasional, Sishankamrata melibatkan secara komprehensif segenap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa (Kemhan.go.id).

c. Penataan komponen pendukung

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, baik Komponen Pendukung maupun Komponen Cadangan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utamanya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari Komponen Pendukung dilakukan untuk menghadapi ancaman militer bukan ancaman nonmiliter.

Dalam rangka menyiapkan dan menetapkan sumber daya manusia sebagai Komponen Pendukung, warga negara dikelompokkan dalam garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya yang diwujudkan menjadi



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

logistik wilayah dan cadangan material strategis. Garda bangsa adalah salah satu unsur utama dalam Komponen Pendukung, yang terdiri atas warga negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan, serta berada dalam satu garis komando yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu tugas-tugas pertahanan pada saat negara membutuhkan Komponen Pendukung.

Unsur-unsur garda bangsa berasal dari unsur POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda), unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dikoordinir oleh Pemda, Resimen Mahasiswa (Menwa) yang pembinaannya di bawah perguruan tinggi, Alumni Resimen Mahasiswa, serta organisasi kepemudaan. Posisi POLRI ditempatkan dalam Komponen Pendukung didasarkan pada statusnya sebagai alat negara yang lingkup fungsi dan pendekatan dalam pelaksanaan fungsinya berbeda dengan tentara. Keanggotan POLRI merupakan warga negara pilihan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan tinggi seperti hal nya dengan tentara. Namun mengingat POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka POLRI tidak dapat secara sertamerta ditransfer sebagai Komponen Utama. Untuk menjadi Komponen Utama, POLRI terlebih

dahulu menanggalkan status kepolisianya, dan selanjutnya mengikuti tahapan rekrutmen sesuai dengan mekanisme untuk menjadi calon prajurit TNI. Dalam Sistem Pertahanan Semesta, posisi yang paling tepat bagi Polisi adalah berada dalam Komponen Pendukung dan karena keterampilannya ditempatkan dalam suku Garda Bangsa. Selain POLRI, warga negara lainnya yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan serta berada dalam satu garis komando adalah Satpol PP dan Linmas yang dimiliki dan dikoordinir oleh Pemda.

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Pasal 255 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP berwenang untuk: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Sesuai dengan fungsinya, agar dapat digunakan

untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komponen Cadangan (lihat Pasal 1 angka 7 UU Pertahanan Negara) maka penggunaan sumber daya manusia sebagai Komponen Pendukung dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 UU Pertahanan Negara).

Penggunaan secara langsung Komponen Pendukung tentunya untuk mendukung komponen utama daerah belakang. Sedangkan penggunaan secara tidak langsung, ditujukan untuk dipersiapkan menjadi Komponen Cadangan sebelum dimobilisasi. Hal ini mengingat Komponen Cadangan itu disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer (Pasal 1 angka 6 jo Pasal 7 ayat (2) UU tentang Pertahanan Negara). Dengan demikian dalam hal pengaturan penggunaan Komponen Pendukung harus memperhatikan Undang-Undang tentang Pertahanan negara.

d. Pembentukan Komponen Cadangan

Dalam rangka melaksanakan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, akan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Komponen cadangan sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. Mencermati kondisi kesiapan komponen cadangan saat ini dihadapkan pada hakekat ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, maka perwujudan komponen cadangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana sesuai dengan uraian dibawah ini.

1. Sumber Daya Manusia.
Sumber daya manusia sebagai komponen cadangan, berhak

atas bela negara sekaligus harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan secara berlanjut dan terarah agar dalam pengembangan dan penggunaan kesiapannya dapat terwujud.

2. Pembinaan sumber daya manusia meliputi pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan. Pembinaan Kekuatan yang diharapkan dari sumber daya manusia adalah mampu meningkatkan kemampuan komponen cadangan yang akan digunakan pada saat mendukung operasi di daerah belakang. Pembinaan kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kesadaran bela negara dengan jumlah yang proporsional.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sedangkan pembinaan Kemampuan. Dengan melaksanakan pembinaan kemampuan diharapkan sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan sesuai dengan profesiya masing-masing dan searah dengan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan komponen cadangan.

3. Pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia meliputi pembangunan fisik, mental, kecerdasan dan keterampilan. Dalam rangka pembangunan tersebut , materi-materi pelajaran budi pekerti di sekolah sebagai pembentukan dasar kepribadian harus menggambarkan dan mengakar pada budaya bangsa sehingga akan membentuk kepribadian yang mampu dihandalkan untuk dapat

meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen cadangan .

4. Pengerahan. Pengerahan sumber daya manusia dalam pembentukan komponen cadangan perlu ditata dan diatur. Untuk itu perlu penyusunan Undang Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan sumber daya manusia, sehingga tidak mengganggu program yang lainnya. Kegiatan pengerahan sumber daya manusia menyesuaikan dengan kebutuhan diwilayah masing-masing.
5. Sumber Daya Alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik yang ada di darat, laut dan udara. Untuk dapat memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada memerlukan pengamanan

dan pengelolaan. Dari sisi pengamanan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan komponen utama maupun cadangan adalah terjaganya kerahasiaan terhadap Kontur Dasar Laut dan Karakteristik Air Laut dari pantauan asing/pihak luar, namun bermanfaat bagi ekonomi dan pertahanan negara Indonesia. Sedangkan di sisi pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan secara terintegrasi.

6. Sumber Daya Buatan. Sumber daya buatan merupakan modal dasar pembangunan nasional dan daerah harus didayagunakan dalam rangka memenuhi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Oleh karena itu

pemanfaatannya harus terarah dengan memperhatikan kelestarian sumber daya akan lingkungan, untuk itu perlu ditinjau aspek pengamanan dalam pendistribusian dan pengaturan dalam pengelolaannya. Aspek pengamanan sumber daya buatan dimulai dari proses ekplorasi yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi tingkat kebocoran dalam pendistribusian. Untuk aspek pengelolaan dalam penggunaan sumber daya buatan agar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam rangka penghematan sumber daya buatan.

7. Sarana dan Prasarana.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah difokuskan untuk meningkatkan perekonomian, oleh karena itu pembangunan

sarana prasarana diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan. Untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kedepan agar mengacu kepada kepentingan pertahanan negara, sehingga sarana prasarana yang ada pada masa damai dapat digunakan untuk kepentingan umum, dan pada saat perang dapat meningkatkan kemampuan TNI sebagai komponen utama. Dalam rangka mensinkronkan kegiatan pembangunan sarana prasarana ditinjau dari aspek pendekatan kesejahteraan maupun aspek pendekatan pertahanan, maka pemerintah pusat atau daerah sebagai instansi yang mengeluarkan kebijaksanaan perlu koordinasi dengan pihak-pihak TNI .

Pengelolaan sarana prasarana sebagai bagian dari komponen cadangan walaupun belum

didukung oleh perundang-undangan yang mengatur, maka sarana prasarana sebagai komponen cadangan perlu di inventarisir dan di uji coba sehingga perwujudan kesiapan sarana prasarana dapat dilaksanakan.

e. Mobilisasi dan Demobilisasi.

Pengaturan tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 disebutkan Mobilisasi adalah tindakan penggerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sedangkan Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

Sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ini, warga negara yang dimobilisasi disebut sebagai Mobilisan yaitu warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga negara anggota Perlindungan Masyarakat, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanannya rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pasal 5 Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyatakan "Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menyatakan mobilisasi." Keadaan Bahaya dimaksud disini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pasal 7 Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyatakan bahwa setiap warga negara sebagaimana dimaksud wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya pada Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya berbunyi bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila : 1) keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alatalat perlengkapan secara biasa; 2) timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; 3) hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959, dalam kondisi keadaan bahaya maka Mobilisasi dikenakan terhadap;

- a. warga negara yang termasuk adalah anggota Rakyat Terlatih, anggota Perlindungan Masyarakat, diperlukan karena keahliannya;
- b. sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawakinya.

Istilah Rakyat Terlatih dalam Undang-Undang Mobilisasi dan Demobilisasi merupakan kesatuan konsep dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Kedua Undang-Undang ini berpangkal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan

Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tidak lagi menggunakan istilah Rakyat Terlatih.

Implikasi dari disahkannya Undang-Undang tentang Pertahanan Negara tersebut maka Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi telah kehilangan subyeknya berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara mengganti istilah Rakyat terlatih menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara setelah diundangkan akan mencabut Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Substansi dari Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi akan diadopsi dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sarana Prasarana Nasional Untuk Kepentingan Pertahanan

Sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara selain harus memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) juga harus sesuai dengan standarisasi militer. Standarisasi nasional dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedangkan untuk standarisasi militer dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 24 ayat (1) berbunyi "Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan

SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian”.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap sarana dan prasarana nasional untuk penggunaan pertahanan negara, pengaturan standarisasi ini dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Di dalam Undang-Undang ini, Pasal 27 ayat (1) dan (2) berbunyi: Pengguna mengusulkan standardisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berdasarkan perencanaan strategis pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan; Standardisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berupa teknologi dan fungsi asasi peralatan yang dituangkan dalam rancangan rencana induk kebutuhan Pengguna.

Standarisasi terhadap peralatan pertahanan dan keamanan negara

tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk pertahanan negara.

Dalam hal darurat dimana negara membutuhkan sarana dan prasarana untuk pertahanan negara maka sarana dan prasarana tersebut harus dapat dimobilisasi sesuai dengan kepentingan nasional namun tetap memperhatikan hak kepemilikan individu. Sarana dan prasarana dilakukan penseleksian terlebih dahulu oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan standarisasi militer peralatan pertahanan dan keamanan negara sehingga penggunaan sarana dan prasarana tersebut tetap memenuhi kelayakan sesuai dengan kebutuhan militer.

Disisi lain didalam penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan pertahanan Negara juga terkait dengan penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Pasal 3 Peraturan Pemeritah ini berbunyi: (1) Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang. (2) Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. (3) Dalam keadaan perang



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang. Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Selain dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas, sesungguhnya banyak peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional yang seharusnya memperhatikan aspek

pertahanan dan keamanan negara, namun demikian sampai dengan saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat sektoral belum mempertimbangkan fungsi kenegaraan secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu pengaturan yang dapat memastikan bahwa pada saat keadaan darurat negara membutuhkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional tersebut, maka unsur-unsur tersebut dapat dimobilisasi dalam rangka memperkuat pertahanan sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Kesimpulan

Permasalahan ancaman terhadap pertahanan negara seperti di kawasan

Asia Pasifik, menunjukkan potensi ancaman adanya saling klaim wilayah teritorial antar beberapa negara yang meningkatkan pengerahan kekuatan militer. Di sisi lain adanya potensi ancaman di dalam negeri berupa gerakan separatis juga mengancam keutuhan NKRI. Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut, penguatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan kekuatan TNI namun juga harus didukung oleh seluruh sumber daya nasional sebagai cerminan dari pertahanan semesta.

Negara harus mampu dalam mengelola dan menggunakan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki untuk menghadapi setiap ancaman yang

membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sebagai upaya mempersiapkan pertahanan negara secara dini, terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Secara filosofis, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sejalan dengan tujuan bernegara yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Secara sosiologis, terdapat permasalahan

besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu munculnya disintegrasi bangsa, oleh karena itu penguatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan penguatan TNI tetapi juga harus disertai dengan membangun kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis, pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan amanat Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sasaran yang akan dicapai dengan dibentuknya UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah terbangunnya sistem pertahanan semesta dimulai dari pembinaan kesadaran bela negara, terdata dan terbinanya Komponen Pendukung serta terbentuknya Komponen Cadangan pertahanan negara, yang siap digunakan memperkuat komponen utama. Arah pengaturannya meliputi: Pembinaan Kesadaran Bela Negara, penyiapan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penataan sumber daya alam dan buatan serta penyiapan sarana prasarana untuk kebutuhan pertahanan negara serta mobilisasi dan demobilisasi.***

Daftar Pustaka

- Christopher Rudolph. 2000. "*Globalization and Security: Migration and Evolving Conceptions of Security in Statecraft and Scholarship*". University of Southern California
- Departemen Pertahanan Indonesia. 2003. *Defending the Country Entering the 21th Century*, Jakarta: Dephan.
- Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu. 2000. Forum untuk Reformasi Demokratis, "Penilaian Demokratisasi di Indonesia".
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas. 2015. Peningkatan Kualitas Sdm Di Bidang Industri Pertahanan Menuju Pertahanan Negara Yang Tangguh. Jurnal Pertahanan April, Volume 5, Nomor 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; dan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.
- Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di
- Perguruan Tinggi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Website :

- Menhan Beberkan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/21/11015331/menhan-beberkan-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2019?page=all>.
- https://setkab.go.id/perpres-no-972015-inilah-kebijakan-umum-pertahanan-negara-tahun-2015-2019/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp566a6a0ee9232=b34e09a815
- <https://www.kemhan.go.id/2016/05/31/sarana-prasarana-nasional-perlu-ditata-dan-disiapkan-untuk-kepentingan-pertahanan.html>.
- <https://www.kemhan.go.id/pothan/2017/03/20/kegiatan-penataan-dan-pembinaan-komponen-pendukung-pertahanan-negara-di-kabupaten-belu-provinsi-nusa-tenggara-timur-ta-2017.html>.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

KEMHAN WUJUDKAN STANDAR KUALITAS DAN PROFESIONALITAS APN

Dalam rangka terwujudkannya standar kualitas dan profesionalitas jabatan Analis Pertahanan Negara (APN), Kementerian Pertahanan mengadakan Rapat Forum Analis Pertahanan Negara (APN) di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Rapat Forum APN dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Kapusdiklat) Bahasa Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigadir Jenderal TNI Yudhy Chandra Jaya, yang pada kesempatan tersebut mewakili Kabadiklat Kemhan, Jumat (20/9) di Common Room Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, Pondok labu Jakarta Selatan. Acara Rapat Forum APN di lingkungan Kementerian Pertahanan

dihadiri oleh Kabag Induk PNS Ropog Setjen Kemhan, A. Rizal, dan 30 orang APN.

Kabadiklat Kemhan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan mengungkapkan Kemhan sebagai instansi pembina jabatan fungsional APN bertanggung jawab untuk menjamin terwujudkannya standar kualitas dan profesionalitas jabatan APN.

Kabadiklat Kemhan lebih lanjut menyampaikan, tujuan dari forum ini adalah untuk membahas draft Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional APN, pembangunan organisasi profesi APN, dan Tunjangan Jabatan APN.

Lebih lanjut Kabadiklat mengatakan terkait dengan tunjangan jabatan perlu diusulkan dengan mempertimbangkan mutu, prestasi, dan produktivitas kerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional APN sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko kerja yang akan dihadapinya.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2016, Analis Pertahanan Negara wajib memiliki satu organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Dan saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk membicarakan pembentukan organisasi profesi tersebut.***

HUT KE -74 TNI, MENHAN BERHARAP TNI SEMAKIN MAJU DAN KUAT SEBAGAI PENGAWAL NKRI

Kementerian Pertahanan menggelar Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke - 74 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diikuti segenap Personel Kemhan, Sabtu (5/10) di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kemhan. Tema pokok pada peringatan HUT Ke-74 TNI Tahun 2019 ini adalah TNI Profesional Kebanggaan Rakyat.

Pada hari yang bersejarah dan membanggakan bagi seluruh keluarga besar TNI, Menteri Pertahanan menyampaikan ucapan selamat kepada segenap Prajurit TNI dimanapun bertugas dan berada.

"Saya selaku Menhan dan atas nama pribadi mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Kita semua berharap TNI ke depan semakin maju dan kuat sebagai pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", harap Menhan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ir V Itjen Kemhan Brigjen TNI Minan Sinulingga selaku Inspektur Upacara.

Dalam sambutan tertulisnya lebih lanjut Menhan mengatakan, memaknai Hari Ulang Tahun ke-74 TNI pada hakekatnya merupakan kesempatan atau momentum bagi TNI untuk merefleksikan dan mengevaluasi diri untuk meningkatkan kualitas perannya sebagai komponen utama dalam pertahanan negara.

Sejalan dengan tema pokok pada peringatan HUT Ke-74 TNI Tahun 2019 ini adalah TNI Profesional Kebanggaan Rakyat, hal ini



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

mengandung makna yang tegas bahwa TNI dituntut terus profesional dalam setiap pelaksanaan tugas demi pengabdiannya kepada bangsa dan negara serta menjadi kebanggaan rakyat.

TNI senantiasa harus berpegang teguh pada jati diri TNI yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. TNI harus menjadi kekuatan yang terus disegani dan kekuatan yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat.

Untuk itu, Kemhan terus memastikan bahwa program Pencapaian Postur TNI melalui pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dalam rangka menghadapi ancaman berjalan dengan baik. Apabila Alutsista makin lengkap, makin modern, serta kemampuan dan profesionalisme

TNI makin tinggi maka diyakini akan semakin memperlancar tugas-tugas operasional TNI.

"Hal ini juga perlu didukung oleh peningkatan pemeliharaan dan perawatan Alutsista, pemenuhan sarana prasarana dan organisasi, dan kesejahteraan prajurit, serta pengembangan industri pertahanan", tandas Menhan.

Menhan menambahkan, disamping penguatan dan modernisasi Alutsista, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan Sumber Daya Manusia TNI. Keunggulan Sumber Daya Manusia TNI akan sangat menentukan keberhasilan tugas di masa mendatang. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan pelatihan akan ditingkatkan.***

KEMHAN MENGADAKAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK



Sumber foto: Biro Humas Setjen Kemhan

Kementerian Pertahanan melalui Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan mengadakan acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2019 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kemhan. Kamis (10/10) di Aula Biro Humas Setjen Kemhan, Jakarta.

Dalam sambutannya Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang dibacakan oleh Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas Setjen Kemhan Kolonel Arh Agus Setyo Hartono, S.A.P., sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, karena kita dapat saling memberikan masukan dan penilaian dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kementerian Pertahanan.

"Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat", ungkap Karo Humas.

Hal tersebut dapat dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dapat diberikan secara teliti, santun, responsif, akurat dan akuntabel agar menjadi penyelenggara layanan informasi publik bidang pertahanan yang tepat.

Dengan demikian, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan FKP tersebut ditetapkan oleh pimpinan unit pelayanan publik. Hasil penyelenggaraan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik kemudian disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Untuk itu dituntut keaktifan dari satker/subsatker yang menyelenggarakan pelayanan publik", tegas Karo Humas.

Lebih lanjut Karo Humas mengatakan bahwa Kemhan sebagai badan publik harus mampu meningkatkan kinerja dalam

pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tugas dan tanggung jawab tersebut sangat terkait dengan satker-satker Kemhan terutama yang memiliki unit pelayanan publik.

Satker/Subsatker yang selama ini melakukan pelayanan publik adalah RS Dr. Suyoto Pusrehab yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat umum dan personel Kemhan. Dittekinhan Ditjen Pothan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan badan usaha peledak dan pelayanan perizinan eksport/impor Alpalhankam, Ditwilhan Ditjen Strahan yang berkaitan dengan pelayanan survey dan pemetaan, Ditkersin Ditjen Strahan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan personel asing yang akan berkunjung di lingkungan Kemhan, serta Biro Humas yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.

Pelayanan tersebut dinilai setiap tahun oleh Ombudsman, KemenPAN RB dan KIP khususnya untuk pelayanan informasi. Beberapa waktu yang lalu Tim KemenPAN RB sudah melakukan survei di Kemhan dan yang ditanyakan adalah pelaksanaan FKP ini. Dengan demikian apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari penilaian KemenPAN RB, sejauhmana pelayanan publik di Kemhan.

Karo Humas mengharapkan peran aktif anggota sekalian dari tiap Satker/Subsatker untuk mendukung kegiatan ini. Apabila ada data-data pendukung yang diminta agar disediakan. Dan kepada Bapak/Ibu yang mewakili publik mohon dapatnya memberikan masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik Kemhan ke depan.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

SEKJEN KEMHAN MENERIMA PENYERAHAN 10 UNIT MOBIL DARI ESEMKA

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A menerima penyerahan 10 unit mobil Esemka kemudian di distribusikan ke Biro Umum Kementerian Pertahanan, Selasa (15/10) di Kementerian Pertahanan Jakarta.

Pembelian mobil Esemka ini adalah bukti kecintaan dan dukungan Kemhan terhadap produksi anak bangsa. Kemhan memberikan apresiasi positif dan mendorong agar produk mobil lokal ini bisa bersaing di industri otomotif Tanah Air.

Pada awal September lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Esemka Bima sekaligus pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. PT SMK sudah bersiap memulai produksi masal kendaraan. Pada tahun pertama PT SMK akan

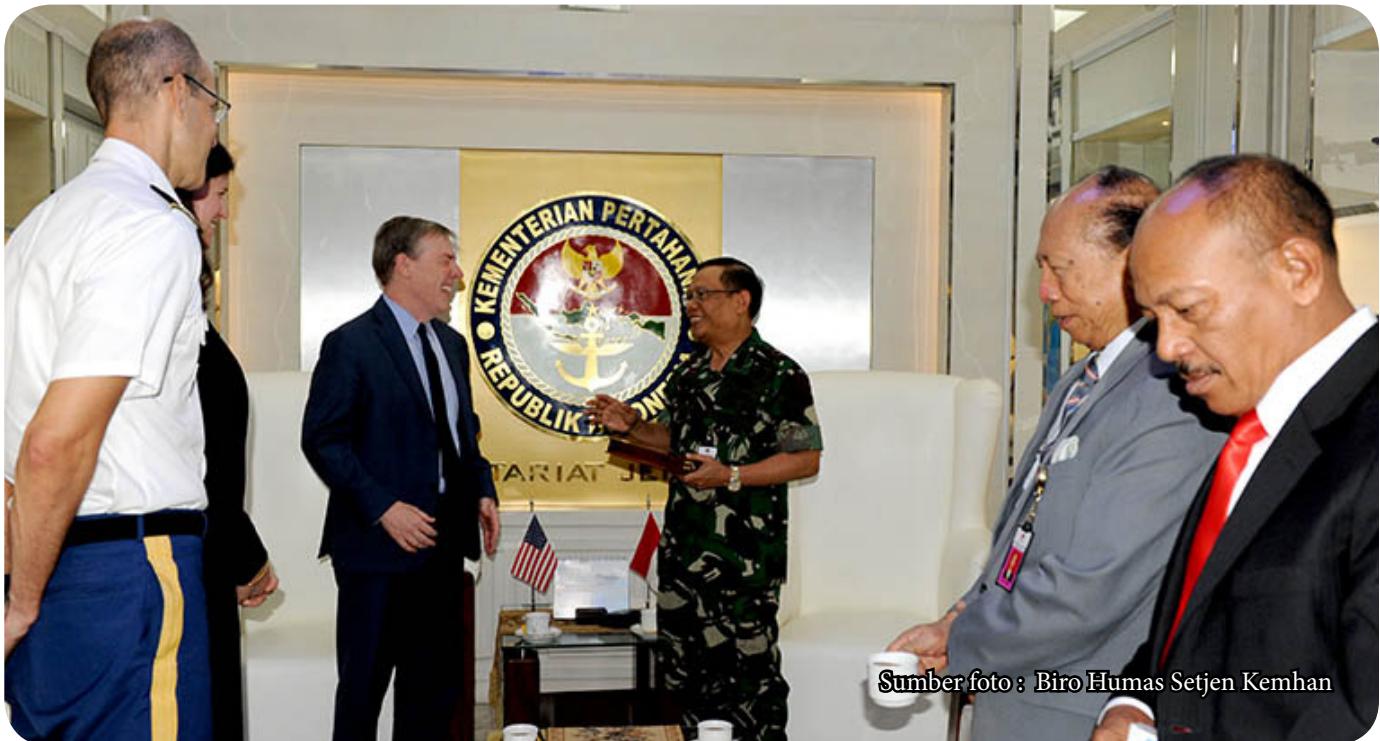
memproduksi sebanyak 3.500 unit pick up Bima dengan kapasitas produksi total sebesar 12.000 unit pertahun.

"10 unit mobil Esemka yang dibeli akan digunakan untuk mendukung tugas Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertahanan RI" jelas Sekjen.

Sekjen Kemhan juga menyampaikan kedepan di tahun yang akan datang, Kementerian Pertahanan akan menambah unit pembelian jika diperlukan guna mendukung kebutuhan operasional tugas satker-satker di jajaran Kementerian Pertahanan.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

PERTEMUAN SEKJEN KEMHAN RI – AS BAHAS KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN

Sekjen Kemhan Laksda TNI Agus Setiadi S.A.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan *the Acting Deputy Assistant Secretary of Defense (DASP) for South and Southeast Asia* Mr. Christopher Johnston, Selasa (22/10), di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pertemuan kedua negara sahabat ini diantaranya membahas kerjasama industri pertahanan khususnya dalam pengadaan pesawat *Hercules 130J5*. Kepada delegasi Amerika, Sekjen Kemhan berharap penandatanganan kontrak yang telah dilakukan beberapa waktu lalu semakin meningkatkan kerjasama kedua negara.

Selain itu Sekjen Kemhan berharap kedepan pihak Amerika dapat membantu percepatan proses pengadaan pesawat *Hercules 130J5*. Tidak menutup kemungkinan kedua negara dalam waktu dekat

akan mengadakan pertemuan atau pembicaraan secara lebih intensif lagi.

Menanggapi hal tersebut, seperti dikatakan Mr. Johnston yang baru pertama menginjakkan kaki di Indonesia bahwa saat ini negaranya

sedang memfokuskan di wilayah di Indo Pacific. Amerika berharap dapat menjadi *partner* yang baik bagi Indonesia dalam bidang pertahanan.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

THE IMPLEMENTATION OF THE ADMM
PLUS EXPERT WORKING GROUP ON
PEACEKEEPING OPERATIONS (EWG ON PKO)
AND HUMANITARIAN MINEACTION FIELD
TRAINING EXERCISE (EWG ON HMA FTX) AS A
DEFENSE DIPLOMACY INSTRUMENT

APPLICATION OF SOUND SURVEILLANCE
SYSTEM (SOSUS) TECHNOLOGY
TO INCREASE SUPERVISION OF FOREIGN
DIVE SHIPS IN ORDER TO MAKE A DEAL OF
STATE DEFENSE

EDITION OF SEPTEMBER-OKTOBER 2019 VOLUME 5/ NUMBER 5



NEW FACES OF LEADERSHIP OF
THE INDONESIAN MINISTRY OF DEFENSE
PERIOD 2019-2024

RESOURCES MANAGEMENT
AND NATIONAL
INFRASTRUCTURE FACILITIES
USAGE TO SUPPORT THE
NATIONAL DEFENSE



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



@kemhanri



@kemhan RI

ISSN 1693-0231



ENGLISH



EDITORIAL

Dear kind readers,

We again greeted WIRA readers through this edition of September-October 2019 Volume V Number 5.

In addition in this edition the editorial team also presented the article about : New Faces of Leadership of the Indonesian Ministry of Defense Period 2019-2024; The Implementation of the ADMM Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operations (EWG on PKO) and Humanitarian Mine Action Field Training Exercise (EWG on HMA FTX) as a Defense Diplomacy Instrument; Application of Sound Surveillance System (Sosus) Technology to Increase Supervision of Foreign Dive Ships in Order to Make a Deal of State Defense; and Resources Management and National Infrastructure Facilities Usage to Support the National Defense.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Editorial Team



EDITION OF SEPTEMBER_OCTOBER 2019

Vol. V/ No. 5

Published by:
Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
Lieutenant General (Ret)
H. Prabowo Subianto

Secretary General of MoD
Vice Admiral
Agus Setiadji, S.AP, M.A

Editor in Chief:

Head of Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Brig. Gen.
Totok Sugiharto, S.Sos .

Managing Editor:

Chief of Public Information and
Library of Public Relation Bureau of
The Secretariat General of MoD
Col. Hadi Prayitno

Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.
Captain Lindu Balyianto.

Graphic Designer:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Photo:

Photographers
of Public Relations Bureau

Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

Contents

ARTICLE ▼

5 /

NEW FACES OF LEADERSHIP OF THE INDONESIAN MINISTRY OF DEFENSE PERIOD 2019-2024

When the welcoming ceremony ended, at that time Defense Minister Prabowo Subianto, who was followed by several Ministry of Defense officials, headed for the building AH Nasution to carry out a series of Position Handover (*Sertijab*). The *Sertijab* is held officially, solemnly and warmly through the signing and submission of Memorandum of Implementation of the Duties of the Minister of Defense carried out by Ryamizard Ryacudu as Minister of Defense in the 2014-2019 Working Period Cabinet to Prabowo Subianto as Minister of Defense in the Indonesian Cabinet Period Forward 2019-2024.



13 / THE IMPLEMENTATION OF THE ADMM PLUS EXPERT WORKING GROUP ON PEACEKEEPING OPERATIONS (EWG ON PKO) AND HUMANITARIAN MINE ACTION FIELD TRAINING EXERCISE (EWG ON HMA FTX) AS A DEFENSE DIPLOMACY INSTRUMENT

20 / APPLICATION OF SOUND SURVEILLANCE SYSTEM (SOSUS) TECHNOLOGY TO INCREASE SUPERVISION OF FOREIGN DIVE SHIPS IN ORDER TO MAKE A DEAL OF STATE DEFENSE

26 / RESOURCES MANAGEMENT AND NATIONAL INFRASTRUCTURE FACILITIES USAGE TO SUPPORT THE NATIONAL DEFENSE



NEW FACES OF LEADERSHIP OF THE INDONESIAN MINISTRY OF DEFENSE PERIOD 2019-2024

By:

Muhammad. Adi. Wibowo, M.Si

Head of Publishing and Promotion Sub Section,
Public Media Information Section Public Relations Bureau
of Secretariat General of the Ministry of Defense

Foto Source: Public Relations of MoD

The dynamics of President Joko Widodo's administration in 2019 have entered a new phase. The description of the dynamics begins with the inauguration process of President Joko Widodo and Vice President Ma'ruf Amin as the winners of the Presidential Election for the 2019-2024 periods, which was held on October 20, 2019 at the MPR/DPR RI Building, Senayan, Jakarta.

The inauguration of the President and Vice President of Indonesia for the next period seems to be the center of attention and highlight of many layers of national and international society. Several leaders of the country as well as important guests in the country also attended the historic inauguration ceremony. One of them is the Prime Minister of Malaysia, HE Mahathir Mohamad, the Sultan of Brunei Darussalam HE Sultan Hassanal Bolkiah, Singapore Prime Minister HE Lee Hsien Loong, the Prime Minister of Australia HE Scott Morrison, Vice President of the People's Republic of China HE Wang Qishan, Vice President of the Republic of Myanmar HE Henry Van Thio, Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam, Đặng Thị Ngọc Thịnh, and other special envoys of other countries.

Apart from a number of friendly countries, the five-year national celebration ceremony was also attended by invited guests from the domestic VVIP and VIPs, including the fifth President of the Republic of Indonesian and was the first female President in Indonesian, Mrs. Megawati Soekarnoputri, the sixth President of Indonesian Susilo Bambang Yudhoyono, TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto, former DPR Chair Akbar Tandjung, and Ketum NasDem

Surya Paloh and previous cabinet ministers.

A few days before the inauguration ceremony for the President and Vice President took place, precisely on October 18, 2019, President Jokowi specifically held a farewell event with Vice President Jusuf Kalla and ministers including TNI General (Retired) Ryamizard Ryacudu who was then still serving as Defense Minister five years working together. Wrapped in the relaxed and warm atmosphere of Vice President JK, all ministers and leaders of state institutions gathered at the end of the Jokowi's leadership period in Volume I.

At that unforgettable moment, Jokowi thanked the Vice President JK and the ministers for all their hard work in the five years of his administration. In addition, the ministers who were members of the Working Cabinet also filled the event by saying goodbye to each other. Some of them even left messages, especially for the employees they left behind. With this farewell event, it indicates that Joko Widodo-Jusuf Kalla's government has officially ended, and so has the Working Cabinet Volume I.

Calling the Names of Prospective Ministers to Inauguration

The day after Joko Widodo-Ma'ruf Amin had officially been appointed President and Vice-President of Indonesian for the 2019-2024 periods, the President began calling the names of prospective ministers in his new Cabinet. It is planned that Jokowi will inaugurate the ministers on Wednesday, October 23, 2019. Several lists of names including Mr. H. Prabowo Subianto were also

summoned by President Jokowi to visit the State Palace.

Wearing a long white shirt H. Prabowo Subianto came to the palace complex to fulfill President Joko Widodo's summons. After meeting with President Jokowi, H. Prabowo Subianto claimed to have been offered to occupy one of the ministerial positions in the Jokowi Cabinet Volume 2, particularly in the defense sector. Mr. Prabowo also responded positively to the offer from the President. In addition, he also claimed to be ready to assist in government in the periods 2019-2024. (<https://www.kompas.com/2019/10/22/>).

A few days after calling the names of prospective ministers in the Working Cabinet, finally on October 23, 2019 President Joko Widodo officially inaugurated 34 State Ministers of the Indonesian Cabinet Forward 2019-2024 Period at the State Palace. The inauguration ceremony began with the reading of presidential decrees read out by the Deputy for Administrative Affairs at the Ministry of State Secretariat. Then the program will be continued by reading the list of names of Ministers and other state officials to be installed. The inauguration of 34 State Ministers of the Advanced Indonesian Cabinet is in accordance with Presidential Decree (Keppres) Number 113 / P 2019.

After reading the cabinet composition list, the very formal procession continued with the reading of the oath of office, which was guided directly by President Jokowi. H. Prabowo Subianto, wearing a black suit and wearing a red tie and wearing a black cap, was among the 33 other Ministers taking the oath of office as Minister

of Defense of the Republic of Indonesian. Then President Jokowi and Vice President Ma'ruf Amin congratulated the ministers who had been elected accompanied by national compulsory songs.

In the final session of the inauguration, the President and Vice President did not forget to take a photo together with his new ministers in the Merdeka Palace Courtyard, Jakarta. President Jokowi said that he was grateful that the inauguration program had been carried out smoothly without any obstacles. If five years before Jokowi had focused on work, work, work, the cabinet this time was aimed at delivering Indonesian forward.

As reported by the official portal Setneg.go.id, Jokowi straightforwardly said that he

would pursue related to the trade balance deficit, the current account deficit, opening up employment opportunities, as well as attracting as much investment as possible. "That democratic reform must be done in a concrete, complicated manner, which is complicated to be simplified. Then of course our top priority for the next five years will be human resource development so that everything related to it must be worked on in a busy way, and bring up a competitive edge, bring up a competitive, better jumping index. And most recently, the use of a focused and targeted APBN," emphasized President Joko Widodo. (<https://setneg.go.id>).

Farewell Moment with All Ministry of Defense Employees

Meanwhile in a separate place, at the Ministry of Defense

Office (23/10) ended his position as Minister of Defense for the 2014-2019 period, General TNI (Retired) Ryamizard Ryacudu said goodbye to all Ministry of Defense employees. The opportunity to say goodbye was carried out through the Farewell Ceremony at the Bhineka Tunggal Ika field, Ministry of Defense Office, Jakarta. In front of the Ministry of Defense staff, General TNI (Ret.) Ryamizard Ryacudu who was accompanied by the Ministry of Defense officials expressed his gratitude for the sincere support from all Ministry of Defense staff, so that for five years they were able to complete their duties properly in the administration of national defense.

General TNI (Ret.) Ryamizard Ryacudu advised all officials and personnel of the Ministry of Defense to carry out their duties

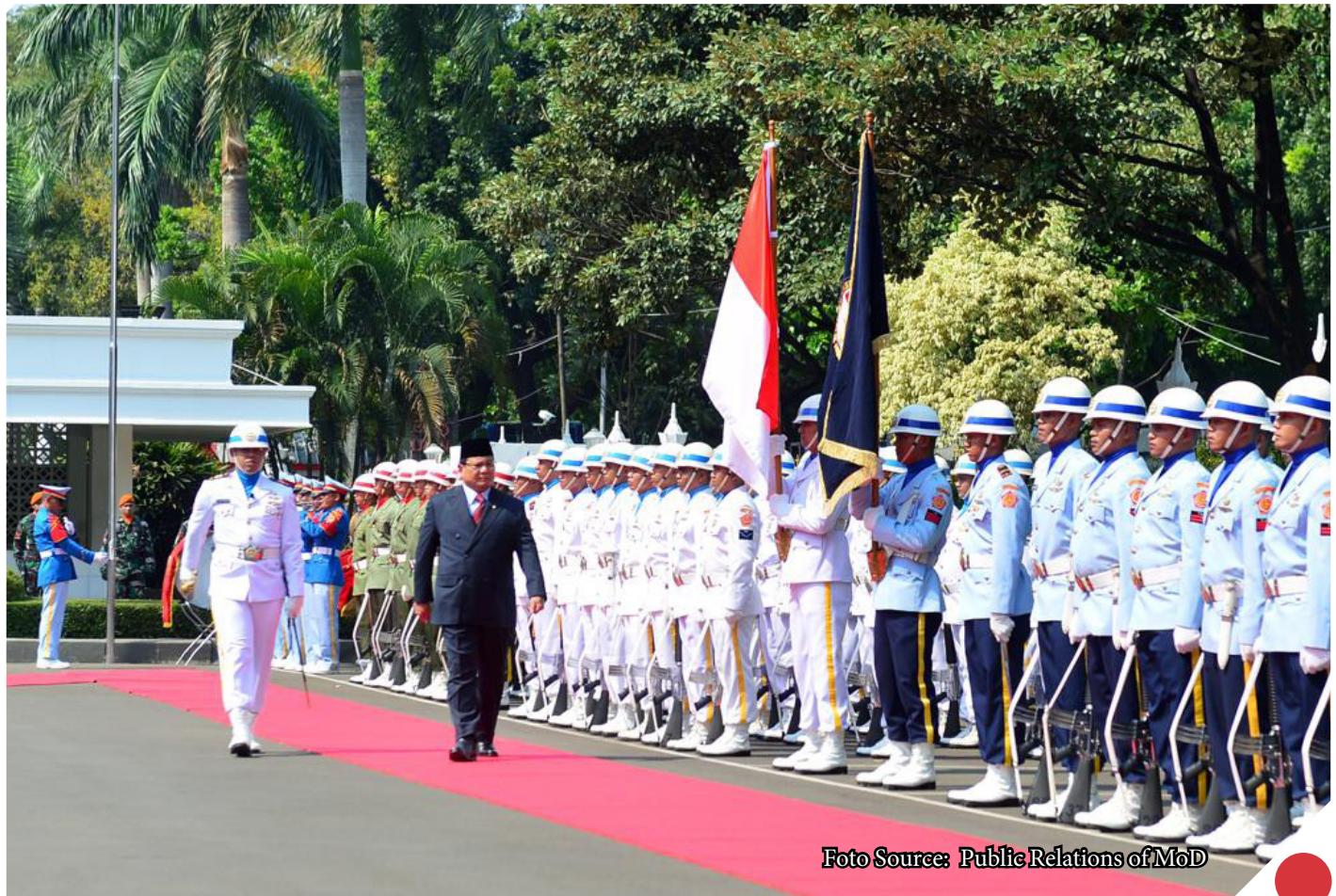


Foto Source: Public Relations of MoD



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

to the best of their obligations and responsibilities as State Apparatus who have been given trust and are paid by the state. In addition, he also reminded to remain loyal and dare to defend honesty and truth until death, and the third message to protect and maintain *Pancasila*, which is a unifying tool of the nation. "Loyal, do the job as well as possible wherever on duty. I pray for all of you to be in good health and in an atmosphere of togetherness, that is the most important thing," ordered Ryamizard Raycudu. The Defense Ministry is expected to be more advanced, successful and able to carry out the task of national defense well. "Tomorrow I hand over the duties and responsibilities to the new leadership, hopefully the Defense Ministry will be more victorious, more stable and respected by people," he added. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/23/>).

As is known, General TNI (Ret.) Ryamizard Ryacudu has been in full office for five years in the 2014-2019 Working Cabinet, and many policies and program achievements that have been carried out for five years lead the Ministry of Defense. One of the achievements of the program includes the realization of a National Defense capable of facing threats, the realization of a National Defense capable of handling maritime territory security, security of the mainland, and the security of the aerospace jurisdiction, the realization of a National Defense capable of playing a role in creating world peace, the realization of a strong defense industry, independent, and competitive and increasing awareness of defending Indonesian citizens.

The Honor Guard, Welcomes Defense Minister Prabowo Subianto

After parting with the Indonesian Military General (Ret.) Ryamizard Ryacudu, the leadership and all employees of the Ministry of Defense were waiting for the arrival of a new Minister of Defense. A day after being officially inaugurated by the President of the Republic of Indonesian

Joko Widodo as Minister of Defense in the Advanced Indonesian Cabinet for the 2019-2024 service period, Defense Minister Prabowo Subianto headed to the Ministry of Defense office to carry out the procession of the Handover Ceremony with Ryamizard Ryacudu as an official of the Defense Minister during the Advanced Indonesian Cabinet Period 2014-2019 service period.

Upon arrival at the Bhineka Tunggal Ika Field, Ministry of Defense Office, Jakarta Kemhan, Thursday (10/24) Minister of Defense Prabowo Subianto was welcomed through the Honorary Ceremony. All officials from various Work Units in the Ministry of Defense also attended the honorarium process. After carrying out the honorary ranks, Secretary General of the Ministry of Defense Laksdyia TNI Agus Setiadji immediately accompanied Minister of Defense Prabowo Subianto, to introduce the ranks of Echelon I and II Officials within the Ministry of Defense. When the welcoming ceremony ended, at that time Defense Minister H. Prabowo Subianto, who was followed by several Ministry of Defense officials, headed for the building AH Nasution to carry out a series of Position Handover (*Sertijab*). The *Sertijab* is held officially, solemnly and warmly through the signing and submission of Memorandum of Implementation of the Duties of the Minister of Defense carried out by Ryamizard Ryacudu as Minister of Defense in the 2014-2019 Working Period Cabinet to Prabowo Subianto as Minister of Defense in the Indonesian Cabinet Period Forward 2019-2024.

Also witnessing the Minister of Defense's Hand over Ceremony program at the moment, the 6th



Vice President of Indonesian Try Sutrisno, former Defense Minister Purnomo Yusgiantoro, Coordinating Minister for Political Law and Security Mahfud MD, Maritime and Fisheries Minister Edhy Prabowo, Deputy Speaker of the Indonesian Parliament Sufmi Dasco Ahmad, TNI Commander Marshal TNI Hadi Tjahjanto, Army Chief of Staff Andika Perkasa, TNI Admiral Siwi Sukma Adji and Army Marshal Yuyu Sutisna.

During the moment of hand over ceremony and the introduction and farewell occasion, the Defense Minister Prabowo Subianto thanked the ranks of the Ministry of Defense and also to Ryamizard Ryacudu who had welcomed his arrival at the Ministry of Defense well. In particular Minister of Defense Prabowo Subianto said goodbye to Ryamizard Ryacudu, and certainly it was hoped that they would continue together

to continue serving the nation and state. Besides that, Defense Minister Prabowo also believes it, although his service as Minister of Defense has been completed, Ryamizard Ryacudu will continue to serve in his field and will continue to voice his love for the Indonesian homeland and to the Red and White flag which will be upheld and held to the last drop of blood. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/24>).

Conversely, Ryamizard Ryacudu congratulated Prabowo Subianto for his appointment as Minister of Defense at the 2019-2024 Future Indonesian Cabinet. According to him, the task and mandate of a Minister of Defense is extraordinary, because it is a very large task, namely the task of maintaining the sovereignty of the country, maintaining the integrity of the country and maintaining the safety of the nation. Furthermore Ryamizard Ryacudu took the time

to express his gratitude and high appreciation for the hard work and dedication to all employees of the Ministry of Defense who have worked together, synergized, and worked according to the mechanisms and regulations. After following the series of handover of the position of Minister of Defense Prabowo Subianto expressed his capacity as Minister of Defense for the Indonesian Cabinet for the 2019-2024 Proposition Period to continue the Ministry of Defense program steps pioneered earlier by Ryamizard Ryacudu. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/24>).

The former Commander of the Army Strategic Reserves Command (*Pangkostrad*) also acknowledged that he was proud to be able to continue the tasks and footsteps of Ryamizard Ryacudu and would do everything in his power to continue what had been pioneered over the past five years. The Defense Minister, who also served as



Foto Source: Public Relations of MoD

Commander General of Indonesian Special Forces (Danjen Kopasus), also said that he would study the situation and the latest conditions of the Indonesian Defense before starting work. He will look for new breakthroughs to progress the development of defense forces. Defense Minister Prabowo Subianto admitted that he had been reminded by his predecessor Defense Minister Ryamizard Ryacudu that the tasks of the

Defense Minister were very heavy in helping the President of the Republic of Indonesia maintain national sovereignty, safeguard national integrity and safeguard national security. The task he received from the President of the Republic of Indonesia was to help strengthen the TNI and to be able to maintain the integrity and integrity of the Unitary Republic of Indonesia. He revealed, in a short time he would soon learn the

tasks that needed to be completed immediately by collaborating with the TNI Headquarters and also the three Forces and related ministries to find the best solution.

The presence of a Deputy Minister of Defense

The dynamics of leadership in the Ministry of Defense today is not only limited to the change of Ministers, but in the era of President Joko Widodo's administration in volume 2, the Ministry of Defense also has a new Deputy Minister of Defense. After being inaugurated by President Joko Widodo, Friday, October 25, 2019, the name Sakti Wahyu Trenggono was officially served as Deputy Minister of Defense to accompany Defense Minister Prabowo Subianto in the Advanced Indonesian Cabinet for the 2019-2024 period. Sakti Wahyu Trenggono is one of 12 Deputy Ministers who assist Ministers in the Advanced Indonesian Cabinet. The inauguration of the deputy minister of state is based on

H. PRABOWO SUBIANTO

Menteri Pertahanan RI
Periode 2019-2024

Tempat/Tanggal Lahir
Jakarta, 17 Oktober 1951

Agama
Islam

Pendidikan

- Akademi Militer Nasional, Magelang (1970-1974)
- American School, London (1964-1967)
- International School, Zurich (1963-1964)
- Victoria Institution, Kuala Lumpur (1960-1963)

Kursus/Pelatihan

- German GSG-9 anti-terror (1981)
- Fort Benning (1985)

www.kemhan.go.id

Karir

- Komandan Jenderal Kopassus TNI (1996-1998)
- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI (1998-1998)
- Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI TNI (1998-1998)
- Presiden Direktur PT Nusantara Energy (2002)
- Presiden Direktur PT Kertas Nusantara (2001-2009)
- Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung (2002)
- Ketua Umum Koperasi Garuda Yaksia (2015)
- Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
- Ketua Umum dan Ketua Partai Gerindra (2008)
- Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (2004)
- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2004)
- Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan (2001)

Tanda Penghargaan

- Bintang Kartika Eka Paksi Naraya
- Satya Lencana Kesetian XVI Tahun
- Satya Lencana Seroja Ulangan - III
- Satya Lencana Dharma
- Satya Lencana Dwija Sistha
- Satya Lencana Wira Karya
- The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja
- Bintang Yudha Dharma Naraya

Publikasi Buku

- Paradoks Indonesia (2015)
- Membangun Kembali Indonesia Raya (2014)
- Selamatkan Indonesia Raya (2009)

10

EDITION OF SEPTEMBER-OCTOBER 2019
VOLUME 5/ NOMOR 5



Foto Source: Public Relations of MoD

Presidential Decree of the Republic of Indonesian Number 72 / M of 2019 concerning Appointment of Deputy State Minister of the Advanced Indonesian Cabinet for the Period of 2019-2024.

As reported by *CNN Indonesia.com* Sakti Wahyu Trenggono who has a background as a technology entrepreneur appointed as Deputy Minister of Defense assigned to help Defense Minister Prabowo Subianto oversee the issue of national defense. Sakti Wahyu Trenggono claimed that President Joko Widodo had entrusted himself with his duties as Deputy Minister of Defense, particularly in the field of defense industrialization in Indonesia so that it would be developed stronger and more advanced (<https://cnnindonesia.com/20191025>).

The two leaders of the Defense Minister, Prabowo Subianto or Deputy Defense Minister Sakti Wahyu Trenggono began their

first assignment, Monday (10/28) by visiting the Defense University (*Unhan*) Bela Negara Campus located in Sentul, Bogor. In addition to visiting existing facilities on the UNHAN Campus, the Defense Minister also gave guidance to officials and staff in the ranks of the Defense University.

In his briefing, the Defense Minister said that the existence of a reliable and superior Human Resources defense was the main key in realizing security stability. UNHAN became the frontline both in providing input for the study of national defense policy and in the implementation of policies. Thus UNHAN is very strategic, the challenges of the education world in the midst of the development of technological science today are very complex. UNHAN is demanded to be able to follow and adjust the dynamics, "It needs innovation and the right strategy to always exist in the midst of global competition," said the Minister of Defense. (<https://www.kemhan.go.id/2019/10/28>).

Apart from the character of each of the two leaders in the Ministry of Defense, both Defense Minister H. Prabowo Subianto and Vice Minister Sakti Wahyu Trenggono will add to the history of the list of officials as Ministers and Deputy Ministers in the Ministry of Defense. As Indonesian citizens who participated in defending the country, it is appropriate for us to support these two new leaders in managing the implementation of the country's defense sector. Besides that, prayers will always be directed to the Minister of Defense and the Deputy Minister of Defense so that in the future they can advance the defense forces even better in order to safeguard the sovereignty of the country, maintain the integrity of the country and maintain the safety of the Indonesian people. ***



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Wakil Menteri Pertahanan RI

Periode 2019-2024

- Tempat / Tanggal Lahir
Semarang, 3 November 1962
- Agama
Islam

Pendidikan

- 2006 : S-2 Magister Management ITB
- 1986 : S-1 Teknik Industri ITB

Karir

- 2018 - sekarang
Komisaris - PT. Merdeka Copper Gold Tbk
- 2018 - sekarang
Direktur Perencanaan dan Pengembangan - INKUD
- 2009 - sekarang
Komisaris- PT. Tower Bersama Tbk
- 2004 - sekarang
Management ITB - Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business
- 2010 - 2016
Komisaris Utama - PT. Teknologi Riset Global Investama
- 2005 - 2016
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi
- 2000 - 2009
Direktur Utama - PT. Solusindo Kreasi Pratama
- 1995 - 1997
Astra Group
 - Management Information System
 - Business Development
 - Supply Chain Management
- 1986 - 1992
Federal Motor
 - Programmer
 - System Analyst & Development

www.kemhan.go.id

Website Reference:

- https://setneg.go.id/baca/index/jokowi_kabinet_kali_ini_arahnya_untuk_mengantarkan_indonesia_maju
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/114049465/prabowo-subianto-tiga-kali-bertarung-di-pilpres-kini-ditawari-jadi-menteri?page=all>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/23/akhiri-jabatan-sebagai-menhan-ryamizard-ryacudu-berpamitan-kepada-pegawai-kemhan.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/24/melalui-upacara-jajar-kehormatan-kemhan-sambut-kedatangan-menhan-prabowo-subianto.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/24/18312.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/25/menhan-prabowo-subianto-akan-lanjutkan-program-program-kemhan.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2019/10/28/menhan-kunjungan-ke-kampus-bela-negara-unhan.html>
- <https://cnnindonesia.com/nasion/91025201924-20-442980/guyon-prabowo-ke-wakil-menhan-kamu-yang-kerja-aku-tidur>

THE IMPLEMENTATION OF THE ADMM PLUS EXPERT WORKING GROUP ON PEACEKEEPING OPERATIONS (EWG ON PKO) AND HUMANITARIAN MINE ACTION FIELD TRAINING EXERCISE (EWG ON HMA FTX) AS A DEFENSE DIPLOMACY INSTRUMENT

By:
Marina Ika Sari
Indonesia Defence University Alumnus



Foto Source: Public Relations of MoD

The ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (The ADMM Plus) is the extension form of cooperation from the ADMM which is a meeting between ASEAN Defense Ministers in the form of dialogue and practical cooperation in the defense sector. The ADMM Plus aims to increase mutual trust (confidence building measures) among ASEAN member states and to maintain peace and security stability in the region (*Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.*). The ADMM Plus was established based on the Concept Note that was adopted at the second ADMM meeting in Singapore in 2007 (ADMM, 2017). The ADMM Plus consists of ten ASEAN member states and eight ASEAN dialogue partner states namely the United States, Australia, the People's Republic of China (PRC), Japan, the Republic of Korea (ROK), New Zealand, India, and Russia (*Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.*).

The ADMM Plus has contributed the Expert Working Groups (EWGs) in implementing cooperation among member states. The EWG has seven focus areas of cooperation agreed upon, including: (1) Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), (2) Military Medicine (MM), (3) Counter Terrorism (CT), (4) Maritime Security (MS), (5) Peacekeeping Operations (PKO), (6) Humanitarian Mine Action (HMA), and (7) Cyber Security (CS) (*Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.*).

Indonesia has a chance to be a host of the ADMM Plus 2019, which was held on 14-22 September 2019 at the International Peace and Security Center (IPSC), *Sentul, Bogor, West Java*. In its implementation this year, the ADMM Plus activities focused on the ADMM Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operations (EWG on PKO) and the

ADMM Plus Expert Working Group on Humanitarian Mine Action Field Training Exercise (EWG on HMA FTX) (*Gewati, 2019*), in which Indonesian and Australia are the co-chair of the ADMM Plus EWG on PKO for the 2017-2020 period (*Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, n.d.*). Those two ADMM Plus focuses are needed as an effort to support the implementation of conflict management in peace and security spectrum (*Poskota News, 2019*).

This joint military exercise was attended by more than 500 participants including military personnel which consists of 52 Subject Matter Experts (SME), 14 instructors, 67 observers, 227 participants namely peacekeepers and mine diffusing troops, 80 role players, and 271 supporters of the exercise from 18 countries (*Pusat Penerangan TNI, 2019*). In general, the ADMM Plus 2019 EWG on PKO



Foto Source: Public Relations of MoD

and EWG HMA FTX aim as efforts to prepare the peacekeeping operations by increasing the collaboration among the ADMM Plus participating states. In addition, this exercise is also carried out as an effort to prevent a war and overcome the possibility of disasters caused by war (Gewati, 2019). The joint military exercise has a strategic value to get the same perceptions in dealing with threats that can disrupt security stability in the region such as tangible and intangible threats, and mindset threats (radicalism) (Gewati, 2019).

In its implementation, the EWG on PKO and EWG HMA FTX activities began with the opening ceremony, joint military exercise, and closing ceremony. Indonesian Defense Minister, Ryamizard Ryacudu officially opened the ADMM Plus EWG on PKO military training and EWG HMA FTX

on 16 September, 2019. The opening ceremony was attended by the Secretary General of the Indonesian Defense Ministry, Agus Setiadji, S.A.P., M.A., Irjen Kemhan Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., and Lieutenant General Dr. Tri Legionosuko, S.I.P., M.AP, as well as senior military officials, ambassadors of ASEAN member states, ADSOM plus officials, and trainees from 18 the regional states (Pusat Penerangan TNI, 2019).

Then, the participants conducted training with scenarios that were trained in PKO exercises, such as Sexual Exploitation Abuse (SEA) consisting of Mine Incident, Unexpected (Illegal) Checkpoints, Children affected in Arm Conflict (CAAC), Security/Screening, and Improvised Explosive Device (IED). Meanwhile, for the scenarios that are trained in HMA FTX exercises,

there are Flatland Areas, Mountain Areas, Road Sections, Forest Areas, and Detection and Neutralization of IED. After completing the training activities, the trainees visited Taman Mini Indonesia Indah (TMII) to see learn about Indonesian culture (Rakyat Merdeka, 2019). The holding of the ADMM Plus EWG on PKO and EWG HMA joint training was closed on September 20, 2019 led by Chief of General Staff, Lieutenant General Joni Supriyanto representing the Commander of Indonesian National Armed Forces, Marshal Hadi Tjahjanto (Novrizaldi & Hutami, 2019).

The ADMM Plus as a Defense Diplomacy Instrument

According to Cottet and Foster, defense diplomacy is "the peacetime use of armed forces and related infrastructure (primarily defense ministries) as a tool of foreign and



Foto Source: Public Relations of MoD



Foto Source: Public Relations of MoD

security policy" and more specifically the use of military cooperation and assistance" (Cottee & Foster, 2004). Referring to the concept of defense diplomacy defined by Cottee and Foster, defense cooperations which are established by the member states of The ADMM Plus EWG on PKO and HMA FTX are basically two forms implementation of defense diplomacy namely (1) multilateral military exercises for training purposes and (2) giving both training and advices on military control democratically, defense management, and technical military sector. Furthermore, the ADMM Plus EWG on PKO and HMA FTX joint exercise are in line with one of defense diplomacy roles that is supporting other countries in enhancing their military capabilities to contribute to the United Nations Peacekeeping Operations and to

counter the proliferation of weapons of mass destruction in efforts to achieve world peace (Cottee & Foster, 2004).

In general, defense diplomacy has three characteristics namely: defense diplomacy for confidence building measures (CBM), defense diplomacy for defense capabilities, and defense diplomacy for defense industry. Defense diplomacy for confidence building measures (CBM) is conducted to develop good relations among the countries, reduce the tension and misperception, introduce transparency in developing their military capabilities, so that, every country will not perceive each other as a threat and they can build mutual trust among them. Besides that, it can also help to build and strengthen the perception related to common interests, change the

mindset of other countries, and open the opportunities in doing the cooperation in other sectors (Muthanna, 2011).

Defense diplomacy for defense capabilities aims to enhance a country's defense capabilities in facing the potential threats. It is related to security cooperation such as joint exercises, having export-import of military equipment, military personnel exchange for education and training purposes. Defense diplomacy for defense industry aims to build and develop a country's defense industry. It can be done by conducting defense industry cooperation, transfer of technology, giving license, and investment in defense industry (Multazam, 2010).

From those three characteristics, the ADMM Plus EWG on PKO and



Foto Source: Public Relations of MoD

HMA FTX are in line with the characteristics of defense diplomacy which aims to build confidence building measures (CBM) and enhance defense capabilities. Basically, the ADMM Plus is conducted and aims to create CBM because the member states try to enhance transparency and mutual trust in the implementation of the cooperation. Furthermore, by conducting this joint exercise, it is expected that it can build mutual trust and the sense of respect among the troops from various countries involved. Through this ADMM Plus EWG on PKO and HMA FTX, it can be seen that the states in the regions are committed to increasing cooperation among countries in order to achieve the common goals, build

CBM, and achieve the quality, so as to encourage peace and stability (*Poskota*, 2019).

By having sharing knowledge and technical skills agenda for the participants in this ADMM Plus activity, it provides experience and can enhance military personnel capabilities, including skills and their readiness in facing challenges in defense sector (Danu, 2019). Besides that, it is expected that the gained knowledge and skills from this joint exercise can be transferred to other military personnel in their respective countries. In line with the Action for Peace Keeping (A4P) initiative, this joint exercise is an application of the efforts in increasing capacity building and performances

as well as partnership which must be established comprehensively to improve professionalism of the peacekeeper troops in the deployed countries and in every mission in the international forum/level (TNI, 2019).

Furthermore, the joint exercise done in the ADMM Plus EWG on PKO can also enhance the member states' military capability in conducting the United Nations peacekeeping operations. Talking about the United Nations peacekeeping troops, it is not only about male peacekeepers who have significant roles in doing the mission, however, the female peacekeepers have their own roles as well. In this ADMM Plus cooperation, female peacekeepers



Foto Source: Public Relations of MoD

participation in the mission countries is also emphasized. It is expected that there will be increasing numbers of women peacekeepers deployed in the mission areas (Giwati, 2019). Female peacekeepers have significant roles in supporting the success and the sustainability of the peacekeeping missions.

Their presence in the mission countries is significantly needed in conducting persuasive approaches to some parties, especially to women and children who have been victims and the most affected parties of the conflict. Besides that, the women peacekeepers can help reducing the tension of the conflict and the confrontation, giving support, being role models for women community in the conflict area, and their presence can create a sense of security for the local population, especially women and children who have been victims of the conflict (Giwati, 2019). In the future, the involvement of women peacekeepers in the United Nations peacekeeping missions and their participation in the joint exercise such as the ADMM Plus EWG on PKO and HMA FXT are

expected to increase.***

References

- ADMM. (2017, 02 06). About the ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) . Retrieved 10 01, 2019, from ADMM: <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html>
- Cottney, A., & Foster, A. (2004). Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance. Oxford: Oxford University Press.
- Danu. (2019, September 20). The The ADMM Plus 2019 Resmi Ditutup, Panglima Minta Peserta Komit Jaga Perdamaian. Retrieved Oktober 3, 2019, from Rakyat Merdeka News: <https://rmco.id/baca-berita/government-action/18494/admm-plus-2019-resmi-ditutup-panglima-minta-peserta-komit-jaga-perdamaian>

- Gewati, M. (2019, 09 17). Menhan Membuka Asean Defense Ministers Meeting di Sentul. Retrieved 10 02, 2019, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/15512911/menhan-membuka-asean-defense-ministers-meeting-di-sentul?page=all>
- Multazam, A. (2010). *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muthanna, K. (2011). Military Diplomacy. *Journal of Defense Studies*, 5, 1-15.
- Novrizaldi & Hutami, A. S. (2019, 09 20). *LatGab Terbesar, TNI Harap Perkuat Kerja Sama Militer*. Retrieved 10 02, 2019, from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/445988/politik/latgab-terbesar-tni-harap-perkuat-kerja-sama-militer>
- Poskota News. (2019, 09 21). Panglima TNI: The The ADMM Plus Refleksikan Upaya Bangun Rasa Saling Percaya Negara ASEAN. Retrieved 10 02, 2019, from Poskota News: <https://poskotanews.com/2019/09/21/panglima-tni-admm-plus-refleksikan-upaya-bangun-rasa-saling-percaya-negara-asean/>
- Pusat Penerangan TNI. (2019, 09 16). Kasum TNI Hadiri The The ADMM Plus EWG on PKO and HMA FTXs Tahun 2019. Retrieved 10 02, 2019, from TNI: <https://tni.mil.id/view-159773-kasum-tni-hadiri-admm-plus-ewg-on-pko-and-hma-ftxs-tahun-2019.html>
- Pusat Penerangan TNI. (2019, 09 20). Panglima TNI : The The ADMM Plus Refleksikan Upaya Strategis Untuk Bangun Rasa Saling Percaya Dan Saling Menghormati. Retrieved 10 02, 2019, from TNI: <https://tni.mil.id/view-160154-panglima-tni-admm-plus-refleksikan-upaya-strategis-untuk-bangun-rasa-saling-percaya-dan-saling-menghormati.html>
- Rakyat Merdeka. (2019, 09 06). The The ADMM Plus 2019 Resmi Ditutup, Panglima Minta Peserta Komit Jaga Perdamaian. Retrieved 10 02, 2019, from Rakyat Merdeka: <https://rmco.id/baca-berita/government-action/18494/admm-plus-2019-resmi-ditutup-panglima-minta-peserta-komit-jaga-perdamaian>
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. (n.d.). ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM). Retrieved 10 1, 2019, from Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia: <http://setnas-asean.id/asean-defense-ministers-meeting-admm>



APPLICATION OF SOUND SURVEILLANCE SYSTEM (SOSUS) TECHNOLOGY TO INCREASE SUPERVISION OF FOREIGN DIVE SHIPS IN ORDER TO MAKE A DEAL OF STATE DEFENSE

By:

Colonel Tek Nanang Hery S., S.T.

Head of Sub Directorate of Material Directorate Governance
Directorate General of Defense Forces Ministry of Defense



Foto Source: Public Relations of MoD

General

As an archipelagic country where two-thirds of Indonesia's territory is sea, logically most of the potential threats to the sovereignty and Indonesian territory are in and or from the sea. The potential for threats is even higher because of Indonesia's geographical position in world trade stream of traffic. In connection with this potential threat, another logical consequence of the recognition of Indonesia as an archipelago is the obligation to determine the flow of traffic for international shipping applied by the establishment of the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI). The existence of ALKI can be utilized by several countries to

carry out various activities and actions related to their interests, with various excuses and reasons to provide protection and security for the fleet of commercial ships and warships. Such conditions result in Indonesian being surrounded by open space (sea) bordering other countries.

In defense perspective, this condition exposes opportunities for threats from various directions, especially from the area of strategic funnels (choke points control). One example of foreign submarines entering the Indonesian territories through ALKI is mostly not monitored optimally, given the relatively limited number of patrol vessels equipped with Sonar. In addition, at the

moment, the Navy has no optimal underwater defense system. In this connection, the biggest challenge is how to monitor the movement of foreign submarines with such vast territorial sea. Therefore, the sea as the media is the center of gravity of national defense which essentially embodies sea control in its entirety. The underwater defense system should get top priority, considering that Indonesian as an archipelagic country is very vulnerable to these threats.

On the other hand, the ideal concept of defense for a country must be able to exploit the physical and non-physical conditions of the country, so it can lead to an advantage that can be used to weaken and defeat the enemy. Based on the condition of Indonesia's geography, especially the hydro-oceanographic aspects, the concept of Indonesia's marine defense is very relevant if it leads to the concept of underwater warfare, both submarine and anti-submarine warfare as well as mine and antipersonnel warfare. Nowadays countries in the region have built up the strength of their combat fleet by purchasing several submarines complete with the main weapons system, specifically torpedoes, as well as spreaders and minefields which are quite reliable supported by the latest technology equipment.

In this regard, the mastery of Sound Surveillance System (SOSUS technology) is perceived to be strategic, both simple and complex ones such as Sonar and torpedoes as well as submarines. The characteristics of seawater media are complex enough to be mathematically modelled so that the difficulty level in the application of SOSUS technology is also high. Countries that have mastered the science and technology of Underwater Acoustic will have the advantage. The concept of applying this technology is implemented by installing underwater sensor equipment such as Fixed Hydrophone or Sonar Station which is used as an underwater detection system that is connected to receiving / monitoring stations on land. SOSUS is a technology that utilizes sound waves that propagate through the sea to the target and are returned as echo to the hydrophone for the detection, search and classification of foreign submarines that cross the Indonesian waters especially in ALKI.

Meanwhile, ALKI security efforts which have been carried out so far is assumed not to be optimal, especially to detect threats coming from under the surface of the water such as the presence of foreign submarines through nearby lanes such as straits that have strategic value. As a form of anticipation for these possibilities, it is necessary to apply SOSUS technology to improve surveillance of foreign submarines.

The limitations of the current defense budget will have implications for limitations in having a detection system capability and limitations in being able to present both surface and underwater elements. Challenged with these conditions, creative, applicative and solutive efforts are needed to continue to have underwater surveillance capabilities to monitor the presence of foreign submarines passing Indonesian waters. The intended security method is to utilize acoustic technology, using Active and Passive Sonar by installing Sonar Station at ALKI gates such as the Sunda Strait, the Lombok Strait and the Makassar Strait which can emit and receive sound waves against reflections of underwater surface objects suspected of being ships dive. The selection of ALKI gates is based on strategic factors, which are related to the alleged use of these waters as one of the main entry points for foreign submarines into Indonesian waters. By considering the hydro-oceanographic conditions of the waters associated with salinity, temperature, sound propagation speed and so on, the Sonar Station placement position is expected to be able to detect all areas of the entrance waters of foreign submarines, so as to produce optimal security all the time, without requires the presence of KRI elements that require large operational funds.

Technology Advances

The global era requires a nation to master the science and technology to be able to survive and achieve the excellence in the 21st century. In the global sphere it is also still coloured by the rapid development of military technology as a result of the Revolution in Military Affairs (RMA). The RMA had an impact on the advancement of military technology, the concept of operations, organization, doctrine and military strategy, even broadly affecting political, social and economic aspects. Directly or indirectly, the RMA has triggered an expansion of the arms race that creates potential conflicts, threats to other countries and affects regional and global security stability.

Increased awareness of the maritime environment (Maritime Domain Awareness / MDA) globally will also affect changes in strategic policies in the region. Sonar technology is still the most reliable in underwater warfare missions, especially in detecting the presence and position of submarines. Being in the Shadow Zone, submarines can be freed from detection of Sonar dating surface ships, or their activities are disguised by natural assistance.

Most foreign submarines entering Indonesian waters are not monitored optimally, given the relatively limited number of patrol vessels equipped with Sonar. In addition to relying on increasingly quiet propulsion technology, Jamming Sonar, sound wave reflecting material, and the ability to survive longer diving, basically Sonar on a hunting boat can be fooled by foreign submarines by utilizing the Shadow Zone.

Shadow Zone is an area where temperature and salinity in the water column layer can reflect or distort the transmission of sound waves. Observing these conditions, the need for the application of SOSUS technology to improve supervision of foreign submarines consequently to increase the ability of the Navy

in submarine warfare and anti-submarine warfare. Thus, a strong national defense and Indonesia as the world's maritime axis can be realized.

Budget Ability

Development of submarine and anti-submarine warfare (AKS) capabilities has so far been trapped in the modernization of the submarine itself. While there are other aspects of the AKS war that have not been explored, planned, programmed and sustained. In AKS warfare capabilities, efforts to detect disparate submarines cannot rely solely on submarines, surface ships capable of AKS and AKS helicopters. All three must be supported also by SOSUS equipment installed in a

number of Indonesian waters that have been a foreign submarine traffic lane.

For example, the Sunda Strait, the Makassar Strait and the Lombok Strait which become the entry points for Australian submarines to Indonesian, Singapore, Malaysia, the South China Sea and the Sulawesi Sea. The SOSUS development issue is indeed not as extensive as submarine procurement. The price of one SOSUS unit is much cheaper than a submarine unit. Since it is not as extensive as the acquisition of submarines, nearly no one pays attention to the importance of building underwater detection capabilities. Until now, Indonesia does not have any SOSUS as a subsurface detection which is one of the main requirements for creating



formidable national defense and Indonesia as the world's maritime axis.

Data and Facts

The dynamics of the development of Navy forces in the Asia Pacific region continues. Although the area is generally stable in security, the potential for conflict is still existing. The conflict is partly related to the maritime domain, especially regarding maritime boundary disputes and has links with the marine resource content in it.

In that context, one focus of strength development that seems to be a "shared" agenda in the Asia Pacific region is the building of AKS warfare capabilities. The building of the AKS warfare capability is a response to the development of several countries in the region that are acquiring new submarines in their fleet combat structure.

Generally, building the capability of AKS warfare

in the region is completed by buying submarines, surface combatant ships and AKS helicopters. Apart from these three things, essentially there are still other elements such as the construction of underwater detection system. However, the latest issue of this publication is not as extensive as the procurement of weapons systems due to the confidentiality. The conception of the Balance of Power becomes the dominant paradigm in the Asia Pacific region in the development of Navy power. Related to this, the Indonesian Navy needs to pay close attention to the dynamics of the development of the surrounding forces, specifically the capability of the AKS war by adopting SOSUS technology as a strategic step in responding to these challenges. Owing to the Navy's Strategic Plan, building the capability of the AKS warfare is one of the priority programs, however there is no development of an underwater detection system or SOSUS.

Strategic Environment Development

- a. Australia. The Royal Australian Navy (RAN), through its 'Plan Blue 2006' program, plans to upgrade and replace its surface fleet within the next 10 years. In May 2009, the Australian Government published a defense white paper document entitled 'Defending Australia in the Asia-Pacific Century: Force 2030'. According to the Australian Defense Minister, the RAN will grow into a maritime force that is far greater and stronger supported by its increased capabilities. In addition to procuring a number of submarines and eight Frigates with AKS warfare capabilities to replace ANZAC class warships, Australia also plans to procure a new transport ship, 20 Offshore Combatant Vessels, 6 Heavy Landing Craft and 1 auxiliary ship.
- b. China. On April 16, 2009, in the 60th anniversary of the Chinese Navy, Admiral Wu Shengli, Commander of the Chinese Navy, stated that the priority of PLAN development in the future included the development of large-size weaponry, warships, stealth capabilities and cruising capability of submarines, supersonic aircraft, missiles more accurate with greater distances, deep sea torpedoes as well as information technology upgrades.

The Chinese government is currently focusing on procuring Navy hardware, training, logistics, modern production capabilities and reliable professionalism of personnel. In the future, the Chinese Amphibian Aircraft Carrier and Fleet are predicted to be able to conduct sea operations and further force projections to protect the sea transportation line that runs through Southeast Asia to the Indian Ocean with the support of AKS warfare capabilities and more reliable nuclear submarines.

Foto Source: Public Relations of MoD

- c. India. In March 2010, Admiral Nirmal Kumar Verma, Navy Chief of Staff of India, said about the ambitions of the Indian Navy who were carrying out Surface Ships, Aircraft and Submarines in accordance with the Navy's power development plans. Through this plan, in 2025 the Indian Navy will operate 162 warships, including 2 Aircraft Carriers and Diesel and Nuclear Submarines. India will complement Network Centric Warfare in most weapons control systems and add sophisticated detection sensor equipment that is capable of supporting the ability of the Navy to operate into a Blue Water Navy.
- d. Malaysia. Malaysian Navy is very concerned about sovereignty disputes in the South China Sea, security in the Malacca Strait, and transnational crime. The complexity of handling those matters faced with limited resources making them as challenges that must be faced. The Malaysian government provided a solution by supplementing the fully operational Submarine Fleet at the end of this decade, the modernization of the Surface Ship Fleet and the procurement of Coastal Patrol Boats.
- e. Singapore. Singapore Navy or the Republic of Singapore Navy (RSN), even though in relatively small numbers, it is equipped with modern defense equipment. The ability of the RSN has improved greatly after the arrival of the last 2 Submarines from the 4 Challenger Class (ex-Sjoormen) submarines which purchased from Sweden in February 2004. In December 2011, the strength of the RSN submarine fleet strengthened over following the completion of one of the

two ships the modernization of the former Swedish Navy AL Archer class (A-17). The new RSN submarine is equipped with an Independent Air Propulsion (AIP) system which is integrated with AKS helicopters and 6 Formidable Class Frigates. RSS Formidable commenced its operations in May 2007 and subsequent vessels started operating two years later. The new RSN frigate has been strengthened with anti-air, anti-ship surface and submarine warfare capabilities.

Integration Approach

Paying close attention to trends in the region related to the capability of the AKS warfare, there are a number of things that should be observed:

- a. **The Significance of the AKS War.** Countries in the Southeast Asian region and beyond are now increasingly aware of the importance of the AKS war, as the submarine population increases in this region. To deal with the threat of submarines, a comprehensive approach is required that must involve elements of Surface Combat Ship, AKS Helicopters, Submarines and underwater detection systems. Such a mindset underlies the increasing attention of the Navy of regional countries towards mastering SOSUS technology.
- b. **Comprehensive Planning.** The development of Navy forces in the Southeast Asian region and beyond is carried out through comprehensive planning. This is reflected in the interoperability capabilities between submarines, surface combatant ships and AKS helicopters supported by

SOSUS as a unity of strength building and the ability to deal with AKS warfare.

- c. **Integration of Three Weapons Subsystems with Detection Systems.** Countries in the Southeast Asian region and its surroundings now have many submarines operating which can be compared to 10 years ago. Submarine operations by a country in general tend to be followed by the acquisition of AKS-enabled Surface Combatant Vessels, AKS helicopters and the application of SOSUS by that country. These developments show that countries in the region are increasingly using a comprehensive approach to build AKS warfare capabilities, not only strengthening the submarine fleet and surface combatant ships, but also equipping AKS helicopters and mastering the SOSUS technology.

Analysis

Submarine acquisition by several countries in the region was followed by the procurement of Surface Combat Ship and AKS Heli. The trend that occurs is the purchase package Surface Combat Ship, AKS Heli and Submarines at the same time by a country, always followed by the mastery and application of SOSUS technology. Such inclinations occur by design and are not mere coincidence, because the power development planning has been clearly formulated. Increased capabilities of submarine warfare and AKS warfare in several countries in the region rapidly, while the ability of the Navy, especially in submarine warfare and AKS warfare and submarine acquisition has not experienced rapid progress.

This resulted in an imbalance in the Navy's combat strength (Imbalance of Power) confronted by the Navy in the region which could lead to superiority actions of other countries in the region towards Indonesia. To be able to fulfil adequate underwater defense capabilities, the Navy must have 15 units of Submarines (Basic Seated Position Method) with a detection probability level reaching 90% (Seskoal, 2006). With the number of Navy Submarines which are only 4 units faced with the existing water area and combat capability, the probability of submarine detection is not optimal (<90%).

Therefore, this paper suggests to make the detection system function of foreign submarines effective and efficient, so that in the entrance of the strategic approach funnel placed the Sonar station which is called SOSUS, whose function is equivalent to the Air Force Radar Unit. The origin of the submission of SOSUS technology is to improve surveillance of foreign submarines in order to embody a formidable national defense as well as Indonesian as the world's maritime axis, as follows:

- a. The fulfilment of SOSUS with the ability to detect submarines from a long distance continuously, classify and determine the position of submarines, and has the effectiveness in the exploration of areas with the objective as early detection (early warning).
- b. Provide a strong deterrence effect and protection for the unity and sovereignty to the entire territory of the Republic of Indonesia as well as in supporting government policies to bring Indonesia as the world's maritime axis.

Conclusion

SOSUS is a technology that utilizes sound waves that travel through the sea to the target and are returned as echo to the hydrophone for the detection, search and classification of foreign submarines that cross the Indonesian waters especially in ALKI.

Foreign submarines that cross the threshold of Indonesian territories through ALKI are mostly not optimally monitored. The biggest challenge is how to monitor the movement of foreign submarines with such vast territorial sea. The underwater defense system should get the top priority, considering that Indonesia as an archipelagic country is very vulnerable to threats from foreign submarines.

The development of AKS warfare capability is not only done by purchasing Submarines, Surface Combat Ships and AKS Heli, but it must be followed by the construction of an underwater detection system.

Yet, Indonesian does not have SOSUS as a detection of subsurface water, so the need for SOSUS

to streamline the function of the detection system for foreign submarines in order to embody a formidable national defense and Indonesia as a world maritime axis.

Suggestion

The need to include underwater detection capabilities or SOSUS in the Navy's Strategic Plan in Phase III (2020-2024) and / or the next stage as an implementation of realizing a formidable national defense and Indonesia as the world's martim axis.

The need to encourage the Defense Industry to carry out Research and Development (R & D) and Defense Industry Technology Development (*Bangtekindhan*) in the field of SOSUS technology and its acoustic instruments to meet the needs of national defense.

The need for further in-depth study of SOSUS and its placement in accordance with the scale of priorities and the needs of national defense.***



Foto Source: MoD

RESOURCES MANAGEMENT AND NATIONAL INFRASTRUCTURE FACILITIES USAGE TO SUPPORT THE NATIONAL DEFENSE

By:

Jusuf Sarante, ST, MS.i

Senior State Defense Analyst Directorate Industrial Technology
Defense Potential Ministry of Defense of The Republic of Indonesia

Introduction

To become a powerful country, the main prerequisite is the ability of the state to organize, prepare, and use all its resources in the national interest. Indonesia with such a large area (additional) has large resources. Starting from the large population to abundant natural resources. Therefore, there is a need for the management of national resources for national defense which include: human resources, natural resources, and artificial resources and infrastructure.

Geographically, Indonesia is also a gateway for the Asia Pacific region. This will create a level of security vulnerability and several other regional issues such as border issues which also deserve serious scrutiny by the Government of Indonesian. Why is that? Since all of these problems are changes in the focus of issues that significantly change the geopolitical and geostrategic maps in almost all regions, followed by potential instability that threatens the existence of a country. The flow of democratization and interdependence, as well as environmental issues also play an important role in changing patterns of interaction between countries where all are strung together in the construction of globalization

as the main impulse (Christopher Rudolph, 2002).

To deal with these increasingly improved and varied threats, Indonesian needs to reorganize its strength. The problem of this threat is certainly not enough to be handled only from the aspect of the core military force alone but to build national resilience there are at least 3 (three) pillars that must be interrelated like government, people, and the military / TNI, all three are woven together as a whole in strengthening a country.

Government and people are bound by ideological knots. Ideology is a hope that is built together deliberately, because the ideology of the state can remain standing. The TNI and the people are bound by the historical node of the harmony of the army-people unity. Both became the epicenter of strength or center of graffiti (CoG) for the TNI. There is no TNI if there are no people because the TNI was born from the people. The concept of the TNI is the people and the people are the army, is the concept of universality which is the capital of the national defense force. The government and the army are bound by a regulation node to build a formal legal foundation that regulates the duties and functions of the TNI in the state system. The Indonesian

National Armed Forces (TNI) is a state tool that handles the defense sector and in its implementation is assisted by other components, namely supporting components and reserve components that come from the people.

By seeing at the background above, a strategic step is needed so that the universal defense system can be applied and the nation's competitiveness is built. One way is to create a system of managing national resources for future national defense. The regulation of national resource management for national defense is very important and strategic with the aim that if the state needs national resources to support the interests of national defense, a legal corridor is available for the use of national resources that are still based on democracy, respect for human rights, and civil supremacy.

National Resources for Defense

Referring to Government Regulation No. 97 of 2015 concerning General Policy for National Defense for 2015-2019, which was signed by President Joko Widodo on August 1, 2015. General Policy for National Defense as referred to is contained in the Appendix which is an inseparable part of the Presidential Regulation, and stipulated as the basis for the Minister

of Defense in setting policies regarding the implementation of national defense for ministries / institutions in setting policies in accordance with their respective duties, functions and authorities related to the defense sector.

In the Presidential Regulation appendix, it is states that national defense is carried out in a universal defense system by combining military defense and non-military defense. The nature of the universe that is developed involves all citizens, territories and other national resources, as well as national infrastructure that is prepared early by the government, and is carried out in a total, integrated, focused, and sustainable.

Meanwhile, related to the regulation on the management of national resources and the national infrastructure of the government in this case the Ministry of Defense together with the Parliament on

September 26, 2019 has passed the Law on Management of National Resources (UU PSDN). In the PSDN Law (additional), in Chapter 1 in the general provisions of article 1, several definitions are explained, including the following: First, National Defense is all efforts to maintain the sovereignty of the state, the territory of the Unitary Republic of Indonesian, and the safety of all nations from threats and disruption to the integrity of the nation and state; second, National Resources are human resources, natural resources, and artificial resources; third, Natural Resources are the potential contained in the earth, water and air which in their original form can be utilized for the benefit of the National Defense; fourth, Artificial Resources are Natural Resources that have been upgraded for the benefit of National Defense; fifth, National Facilities and Infrastructure are the results of human resources which can be used as supporting tools for the interests of the National Defense in the framework

of supporting national interests; sixth, the Main Component is the Indonesian National Army which is ready to be used to carry out defense tasks; seventh, the Reserve Component is a National Resource that has been prepared to be mobilized through mobilization in order to enlarge and strengthen the strength and capability of the Main Component; eighth, the Supporting Component is a National Resource that can be used to improve the strength and capability of the Main Component and the Reserved Component; ninth, Fostering State Defending Awareness is all efforts, actions and activities carried out in the context of providing knowledge, education, and / or training to citizens to foster attitudes and behavior and instill the basic values of defending the country; tenth, Mobilization is the act of mobilizing and simultaneously using National Resources and National Facilities and Infrastructure that have been prepared and fostered as components of the National Defense force to be used



Foto Source: Public Relations of MoD

appropriately, integrated and directedly for handling any threats, both from abroad and from within the country which endangers the unity and integrity of the nation and the survival of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesian; eleventh, Demobilization is an act of stopping, mobilizing, and using National Resources and National Facilities and Infrastructure after carrying out the Mobilization tasks; twelve, Citizens are citizens of the Republic of Indonesian; thirteenth, the Commander of the Indonesian National Army is a high-ranking military officer who leads the Indonesian National Army; fourteenth, the Minister is the minister who organizes government affairs in the field of defense; fifteenth, the Central Government, hereinafter referred to as the Government, is the President of the Republic of Indonesian who holds the authority of the government of the Republic of Indonesian assisted by the Vice President and ministers as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian.

From the description above, the management of National Resources for National Defense is an effort, action, and activity to transform human resources, Natural Resources, and Artificial Resources into a National Defense force which is ready to be used for the benefit of National Defense. In addition to Human Resources, Natural Resources, and Artificial Resources as referred to in paragraph (1), the management of National Resources for National Defense

also applies to National Facilities and Infrastructure (UU PSDN, 2019).

Besides, the management of National Resources for National Defense also mentioned in Article 2 is carried out through efforts of: a. Defend the Nation; b. Building the Main Components; c. Structuring Supporting Components; d. Formation of Reserve Components; and e. Mobilization and Demobilization. Provisions regarding the management of National Resources in the effort to develop the Main Components as referred to in paragraph (1) letter b are implemented in accordance with the provisions of the legislation.

a. The Meaning / Meaning of State Defense

National Defense is defined as the determination, attitude, and action of citizens who are organized, comprehensive, integrated and sustained by their love of homeland and nation as well as national life awareness (Winarno, 2013: 228). In the Constitution of 1945 Article 27 Section 3 states that; "Every citizen has the right and the right to participate in the State's defense effort." Every citizen is entitled and required to participate in the defense of the country as stated in Article 30 Section 1 that; "Every citizen has the right and the right to participate in the country's defense and security efforts."



Foto Source: Public Relations of MoD



Foto Source: Public Relations of MoD

Meanwhile, the Explanation of Law No. 3 year 2002 on the defense of the state defined that the efforts of the country's citizenship were the attitude and behavior of the citizens motivated by their love for the Homeland based on the *Pancasila* and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and nation. The struggle of the nation, in addition to its basic human obligations, is also an honor for every citizen who is fully exercised in the knowledge, responsibility, and willingness to sacrifice in the service of the country and nation.

b. Development of the Main Components of Defense

In order to safeguard, protect, and preserve the national security, Article 30 of the Constitution 1945 mandates that national defense and security efforts is carried out through the system of defense and security

of the people (*Sishankamrata*) with the Indonesian National Army and the Indonesian National Police, supporters. *Sishankamrata* is a state-of-the-art doctrine and at the same time a national defense strategy that utilizes the full strength and ability of military and non-military components in a comprehensive and integrated manner. *Sishankamrata* is also a strategy of suppression of nationality, secularity, and prosperity. In order to ensure the importance of national security, *Sishankamrata* involves the comprehensiveness of all ministries and non-governmental agencies as well as the legal participation of all elements of the nation (Kemhan.go.id).

c. The arrangement of supporting components

In Law Number 3 of 2002 concerning the National Defense,

both Supporting Components and Reserves Components are prepared to face military threats that place the Indonesian National Army as its main component. Thus, human resource management as part of the Supporting Component is carried out to deal with military threats rather than non-military threats.

In the context of preparing and establishing human resources as a Supporting Component, citizens are grouped in the national guard, experts and other citizens who are transformed into regional logistics and strategic material reserves. National Guard is one of the main elements in the Supporting Component, which consists of citizens who have special skills and ability, fighting spirit, discipline, and are in a line of command that can be mobilized at any time to assist in defense tasks when the country needs the Supporting component.



Foto Source: Public Relations of MoD

The elements of the national guard come from elements of the National Police, the Civil Service Police Unit (*Satpol PP*) owned by the Regional Government (*Pemda*), the element of Community Protection (*Linmas*) coordinated by the Regional Government, the Student Regiment whose guidance is under the tertiary institution, Student Regiment Alumni, and youth organizations. *POLRI*'s position is placed in the Supporting Component based on its status as a tool of the state whose scope of function and approach in carrying out its functions differs from that of the army. Membership of the Indonesian National Police is a choice citizen with high qualifications and skills as is the case with the army. However, considering that *POLRI* is a state tool that maintains public security and order and is tasked with protecting, protecting, serving the community, and enforcing the law as stipulated in Article 30 paragraph (4) of the 1945 NRI Constitution, the *POLRI* cannot be personally transferred as a Main Component. In order to become a Major Component, the Indonesian National Police will first abandon the status of the police force, and then follow the recruitment stage in accordance with the mechanism to become a candidate for TNI soldiers. In the Universal Defense System, the most appropriate position for the Police is in the Supporting Component and because of their

skills placed in the National Guard tribe. In addition to *POLRI*, other citizens who have special skills and ability, fighting spirit, discipline and being in the same line of command are *Satpol PP* and *Linmas* which are owned and coordinated by the Regional Government.

Satpol PP is part of the regional apparatus in the field of law enforcement, public order and public peace. According to Article 255 paragraph (2) of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, *Satpol PP* is authorized to:

- a. conduct non-judicial control measures against members of the community, apparatus, or legal entity who violate the Regional Regulation and / or Regional Regulation;
- b. cracking down on community members, officials or legal entities that disturb public order and public order;
- c. carry out investigative actions against members of the public, apparatus, or legal entity suspected of violating Local Regulations and / or Regional Regulations; and
- d. carry out administrative actions against members of the public, apparatus or legal entities that commit violation of Local Regulation and / or Regional Regulation.

In accordance with its function, so that it can be used to improve the strength and capability of the main components and the Reserve Component (see Article 1 point 7 of the National Defense

Law), the use of human resources as a Supporting Component can be done directly or indirectly (Article 8 of the National Defense Law).

Direct use of the Supporting Components, of course, to support the main components in the back area. Whereas indirect use is intended to be prepared as a Reserve Component before being mobilized. This is because the Reserve Component is prepared to be mobilized through mobilization to enlarge and reinforce the strength and capability of the main components in facing military threats (Article 1 number 6 jo Article 7 paragraph (2) of the Law on National Defense). Thus, in terms of regulating the use of Supporting Components must pay attention to the Law on National Defense.

d. Formation of Reserve Components

In the framework of implementing the universal defense system of

Indonesia, all national resources will be involved. Reserve components as part of national resources need to be built, maintained and developed so that their readiness can be realized so that they can be used to improve the strength and capability of key components. Observing the current condition of the reserve component is faced with the nature of the threat as an impact of the development of a rapidly changing strategic environment, the realization of the reserve component consisting of human resources, natural resources, artificial resources and infrastructure facilities in accordance with the description below.

1. Human Resources. Human resources as a reserve component, have the right to defend the country at the same time must have a love for the motherland, have national and state awareness and believe in the power of *Pancasila* as

an ideology of the nation. Therefore, it needs to be built and developed continuously and directed so that the deployment and use of its readiness can be realized.

2. Development of human resources includes building strength and capacity building. Strength training expected from human resources is to be able to increase the ability of the reserve components that will be used when supporting operations in the rear area. The expected development of the strength of human resources is to increase the quality of awareness of the state defense in proportional numbers.

Whereas capability building. By carrying out capacity building, it is expected that the available human resources have the



Foto Source: Public Relations of MoD



Foto Source: Public Relations of MoD

ability in accordance with their respective professions and are in line with what is needed in order to improve the capabilities of the reserve component.

3. Development. Human resource development includes physical, mental, intelligence and skill development. In the framework of this development, the subject matter of character in schools as the basis of personality formation must describe and take root in the nation's culture so that it will form a personality that can be relied upon to be able to increase the ability and strength of the reserve component.
4. Deployment. The mobilization of human resources in the formation of reserve components needs to

be arranged and regulated. For this reason, the formulation of a law governing the procedures for mobilizing human resources is necessary so that it does not interfere with other programs. The activities of mobilizing human resources adjust to the needs of their respective regions.

5. Natural Resources. Indonesia has abundant natural resources both on land, sea and air. To be able to utilize all available natural resources, it requires security and management. In terms of security that are expected in order to increase the main components and reserves are maintained secrecy against the seabed contour and seawater characteristics from foreign / external monitoring, but it

is beneficial for the economy and defense of the Indonesia. Meanwhile on the management side, of the natural resources can be utilized to improve the capabilities of key components and reserve components in an integrated manner.

6. Artificial Resources. Artificial resources are the basic capital of national and regional development that must be utilized in order to meet the welfare and defense interests. Therefore, its utilization must be directed with regard to the preservation of resources for the environment, for this reason, it is necessary to review the security aspects in the distribution and regulation of its management. The aspect of securing artificial resources starts from excessive

exploration processes, so as to reduce the level of leakage in distribution. For management aspects in the use of artificial resources to be adjusted to the level of need in order to save artificial resources.

7. Facilities and Infrastructure.

The development carried out by the government is focused on improving the economy, therefore the development of infrastructure is directed through the welfare approach. For the implementation of infrastructure development in the future, it should refer to the interests of the national defense, so that infrastructure facilities that exist during peacetime can be used for the public interest, and during the war can increase

the ability of the TNI as the main component. In order to synchronize infrastructure development activities in terms of the welfare approach and defense approach aspects, the central or regional government as the agency issuing the policy needs to coordinate with the TNI.

The management of infrastructure as part of the reserve component, although it is not yet supported by the legislation that governs, the infrastructure as a reserve component needs to be inventoried and tested so that the realization of infrastructure readiness can be carried out.

e. Mobilization and Demobilization.

The regulation on Mobilization and Demobilization in Law Number 27 of

1997 is a delegation from Law Number 20 of 1982 concerning the Principles of National Defense.

Law Number 27 of 1997 concerning Mobilization and Demobilization Article 1 of Law Number 27 of 1997 states that Mobilization is the act of mobilizing and using simultaneously national resources and national facilities and infrastructure that have been developed and prepared as components of the national defense and security forces for used appropriately, integrated, and directed for overcoming any threat, both from abroad and from within the country while Demobilization is an act of stopping the deployment and stopping the use of national resources as well as national facilities and infrastructure that apply to all regions of the country which are held in stages in order to restore functions and tasks of each



Foto Source: Public Relations of MoD

element as before the entry into force of mobilization.

Whereas in Article 1 number 4 of this Law, citizens who are mobilized are referred to as the mobilisians, as Citizens of Trained People members, Citizens of Community Protection members, and citizens who because of their expertise are mobilized. Whereas in Article 1 number 7, the Trained People are the basic components of the state defense and security force, which are capable of carrying out the functions of public order, people's protection, people's security and people's confrontation in the context of implementing state security and defense. Article 5 of the Law on Mobilization and Demobilization states "In the case of all or part of the territory of the Republic of Indonesian in danger, the President may declare mobilization." The Hazard Conditions referred to herein refer to Law Number 23 Prp. 1959 concerning the State of Danger. Article 7 of the Law on Mobilization and Demobilization states that every citizen as intended must fulfill the call for mobilization.

As for Law Number 23 Prp. 1959 concerning the State of Danger in Article 1 paragraph (1) of Law Number 23 Prp. In 1959 concerning the State of Danger stated that the President / Supreme Commander of the Armed Forces declared all or part of the territory of the Republic of Indonesian in a state of danger with a degree of civil emergency or military emergency or state war, if: 1) security or law order throughout the territory or in the territory of the Republic of Indonesian is threatened by rebellion, riots or due to natural disasters, so that it is feared that it cannot be overcome by ordinary equipment; 2) war arises or danger of war or fear of rape in the territory of

the Republic of Indonesian in any way; 3) the life of the State is in a state of danger or from special circumstances it turns out there is or is feared there are symptoms that can endanger the life of the State. Based on Law Number 23 Prp. In 1959, in a state of danger, Mobilization was imposed on;

a. Citizens included are members of the Trained People, members of Community Protection, required because of their expertise;

b. natural resources, artificial resources, as well as national facilities and infrastructure owned by the state, private sector, and individuals including the personnel who monitor them.

The term People Trained in the Mobilization and Demobilization Act is an integrated concept with Law Number 56 of 1999 concerning Trained People. Both of these laws are rooted in Law Number 20 Year 1982 concerning the Principles of National Defense. Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in lieu of Law Number 20 of 1982 no longer uses the term Trained People.

The implication of the passing of the Law on National Defense is that the Law on Mobilization and Demobilization has lost its subject based on the latest laws and regulations. The Law on National Defense substitutes the term trained People to become a Reserve Component and a Supporting Component. The Draft Law on Management of National Resources for National Defense after promulgation will repeal the Law on Mobilization and Demobilization. The substance of the Law on Mobilization and Demobilization will be adopted with adjustments based on Law Number 3 of 2002 concerning National Defense.

National Infrastructure Facilities for Defense Interest

National facilities and infrastructure for national defense in addition to meet the criteria of the Indonesian National Standard (SNI) must also comply with military standards. National standardization is carried out by the National Standardization Agency (BSN) while military standardization is carried out in coordination with the Ministry of Defense. In accordance with Law Number 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, Article 24 paragraph (1) reads "In matters relating to the interests of safety, security, health, or preservation of environmental functions, ministries / non-ministerial government agencies are authorized to determine the application of SNI in a mandatory by Ministerial Regulation or Head of Non-ministerial Government Institution Regulation".

Based on that matters, the national facilities and infrastructure for the use of national defense, this standardization regulation is synchronized with Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry. In this Law, Article 27 paragraph (1) and (2) reads: User proposes standardization of Defense and Security Equipment Tools based on strategic planning for the construction of defense and security forces; Standardization of Defense and Security Equipment Tools in the form of technology and equipment's basic functions as outlined in the design of the master plan for User needs.

The standardization of the country's defense and security equipment is further regulated by Regulation of the Minister of Defense Number 31 of 2013 concerning the Implementation of Standardization of Indonesian Military

Commodities within the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces. Facilities and infrastructure are one of the national resources that can be used for national defense.

In the case of emergencies where the state requires facilities and infrastructure for national defense, such facilities and infrastructure must be mobilized in accordance with national interests while still taking into account individual ownership rights. Facilities and infrastructure are firstly selected by the Ministry of Defense based on the military standardization of state defense and security equipment so that the use of these facilities and infrastructure still meets eligibility

according to military requirements.

On the other hand, the use of facilities and infrastructure for the advantage of national defense is also related to the preparation of spatial plans related to defense and security functions as subsystems for regional spatial plans regulated by Government Regulation No. 68 of 2014 concerning the Structuring of National Defense Areas.

Article 3 This Government Regulation stated: (1) A part or all of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesian can be used for the purposes of administering national defense, both during peacetime and in

a state of war. (2) During the period of peace as referred to in paragraph (1), the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesian is used as a Defense Area for the purpose of development and fostering defense capabilities as an embodiment of the nation's deterrent power. (3) In the state of war as referred to in paragraph (1), the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesian is used as the Defense Territory for war purposes. The implementation of spatial planning of the Defense Region is carried out in an integrated manner with the spatial planning of the national territory, spatial planning of the provincial area, and spatial planning of the district / city area.



Foto Source: Public Relations of MoD



Foto Source: PublicrelationsofMoD

Aside from the above-mentioned laws and regulations, in fact many other laws and regulations related to natural resources, man-made resources and national infrastructure which should pay attention to aspects of national defense and security, but to date, the existing laws and regulations there is still a sectoral nature not yet considering the overall state function. For this reason, arrangements need to be made to ensure that during a state of emergency the state requires natural resources, artificial resources and national infrastructure, these elements can be mobilized in order to strengthen defense while maintaining national sovereignty.

Conclusion

The problem of threats to national defense, such as in the Asia Pacific region, shows the potential threat to territorial claims between countries that increase the deployment of military power. On the other hand, there are potential threats in the form of separatist movements in the country also threaten the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. In facing this potential threat, defense strengthens the state is not enough just by the strength of the TNI but also must be supported by all national resources as a reflection of universal defense.

The state must be able to manage and use all national resources it has to deal with any threat that jeopardizes the integrity of the nation and state. As an effort to prepare for early national defense, directed, integrated and sustainable according to the law on the management of national resources for national defense as a legal basis for its implementation.

Philosophically, the management of national resources for national defense is in line with the purpose of the state which is to protect the entire nation of Indonesia and the whole of Indonesia's blood spill and to participate in carrying out world order.

Sociologically, there is a big problem in national and state life, specifically the emergence of national disintegration, therefore strengthening national defense is not enough just to just reinforced the TNI but must also be accompanied by building awareness of national defense for all Indonesian people. Legally, the regulation of national resource management for national defense is mandated by Article 30 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian and Article 8 and Article 9 of Law Number 3 of 2002 concerning National Defense.

The target that will be achieved with the establishment of the Law on Management of National Resources for National Defense is the development of a universal defense system starting from fostering awareness of national defense, data and development of the Supporting Components and the formation of the National Defense Reserves Component, which is ready to be used to strengthen the main components. The direction of regulation includes: Development of Defending State Awareness, preparation of Supporting Components, formation of Reserves Components, arrangement of natural and man-made resources as well as preparation of infrastructure facilities for the needs of national defense as well as mobilization and demobilization.***

Bibliography

- Law Number 23 Prp. 1959 concerning the State of Danger; and
- Law Number 27 of 1997 concerning Mobilization and Demobilization.
- Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Websites:**
 - Minister of Defense Exposes 2019 National Defense Policy ", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/21/11015331/menhan-beberkan-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2019?page=all>.
 - https://setkab.go.id/perpres-no-972015-inilah-kebijakan-umum-pertahanan-negara-tahun-2015-2019/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp566a6a0ee9232=b34e09a815
 - <https://www.kemhan.go.id/2016/05/31/sarana-prasarana-nasional-perlu-ditata-dan-disiapkan-untuk-kepentingan-pertahanan.html>.
 - <https://www.kemhan.go.id/pothan/2017/03/20/kegiatan-penataan-dan-pembinaan-komponen-pendukung-pertahanan-negara-di-kabupaten-belu-provinsi-nusa-tenggara-timur-ta-2017.html>
- Christopher Rudolph. 2000. "Globalization and Security: Migration and Evolving Conceptions of Security in Statecraft and Scholarship". University of Southern California
- Department of Defense. 2003. Defending the Country Entering the 21th Century, Jakarta: Dephan.
- International Institute for Aid for Democracy and Elections. 2000. Forum for Democratic Reform, "Assessment of Democratization in Indonesia".
- The preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Triyoga Budi Prasetyo and Sugeng Berantas. 2015. Improving the Quality of Human Resources in the Field of Defense Industry Towards a Strong National Defense. April Defense Journal, Volume 5, Number 1
- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 27 paragraph (3)